

2023

KECAMATAN
KIARAONDONG



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) KECAMATAN KIARAONDONG

Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima di Kecamatan Kiaracondong



PEMERINTAH KOTABANDUNG
KECAMATAN KIARAONDONG

Jln. Babakansari No. 177 Telp. (022) 727-1101

BANDUNG

KEPUTUSAN
CAMAT KIARAONDONG KOTA BANDUNG
NOMOR : PN.03.03/Kep.16 - Kec. Kc/II/2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG
TAHUN 2023

CAMAT KIARAONDONG KOTA BANDUNG

Menimbang:

- a. bahwa Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung telah menetapkan Surat Keputusan Nomor : 900/Kep.25 - Kec.Kc/XII/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung Tahun 2018-2023;
- b. bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas adalah merupakan rencana pembangunan di wilayah Kecamatan Kiaracundang untuk jangka waktu 5(lima) tahun, maka sebagai tindak lanjutnya perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung sebagai rangkaian pembangunan tahunan dengan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Kecamatan Kiaracundang yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Kiaracundang Kota Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracundang Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Tahun 2023;

- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2023 sebagaimana Diktum Pertama merupakan pelaksanaan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya;
- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan dokumen perencanaan teknis dan operasional yang dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi program prioritas maupun arahan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran di dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

pada tanggal : 17 Februari 2023

CAMAT KIARACONDONG



Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19651205 199303 2 008



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah yang terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kiaracondong setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana





Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Kiaracondong yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Kiaracondong dalam penyusunannya dilakukan melalui 4(empat) pendekatan yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan Partisipatif dan Bottom - Up, (3) Pendekatan Top - Down, dan (4) Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan daerah.

RKPD Kecamatan Kiaracondong tahun 2023 merupakan rencana tahunan, dimana dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong tahun 2018 - 2023 telah masuk tahun kelima atau tahun terakhir dari periode RPJMD 2018 - 2023. Oleh karena itu, salah satu untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD maka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD berikutnya.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2023.





Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kiaracondong khususnya dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Februari 2023

Camat Kiaracondong





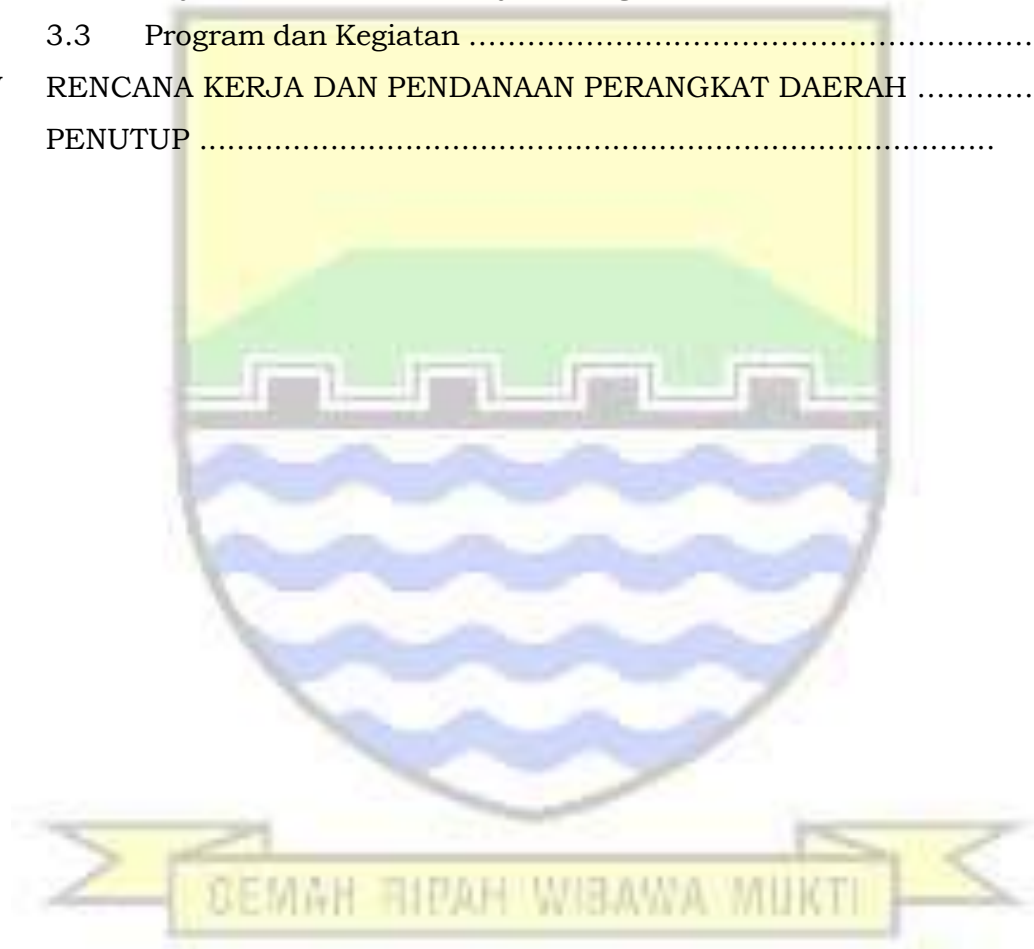
DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GRAFIK | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR DIAGRAM | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 7 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 11 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022 | 13 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Capaian Renstra Kecamatan Kiaracondong | 13 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 31 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kiaracondong | 140 |
| 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD | 143 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 154 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 163 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 163 |
| 3.1.1. Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 | 163 |
| 3.1.2. Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat | 165 |





| | | |
|--------|---|-----|
| | 3.1.3. Penelaahan terhadap Rancangan KLHS | 169 |
| | 3.1.4. Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung | 173 |
| | 3.1.5. Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong | 175 |
| 3.2 | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 181 |
| 3.3 | Program dan Kegiatan | 183 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 187 |
| BAB V | PENUTUP | 200 |





DAFTAR TABEL

| | | |
|------|--|----|
| 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat | 25 |
| 2.2 | Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong | 38 |
| 2.3 | Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023 | 39 |
| 2.4 | Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong | 46 |
| 2.5 | Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023 | 47 |
| 2.6 | Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong | 59 |
| 2.7 | Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023 | 60 |
| 2.8 | Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong | 72 |
| 2.9 | Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023 | 73 |
| 2.10 | Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022 | 85 |
| 2.11 | Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022 | 87 |
| 2.12 | Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022 | 88 |
| 2.13 | Pencapaian Target Misi | 88 |
| 2.14 | Kategori Pencapaian Indikator Sasaran | 89 |





| | | |
|------|---|-----|
| 2.15 | Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong | 91 |
| 2.16 | Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023 | 92 |
| 2.17 | Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong | 99 |
| 2.18 | Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023 | 101 |
| 2.19 | Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong | 114 |
| 2.20 | Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023 | 115 |
| 2.21 | Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong | 128 |
| 2.22 | Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023 | 129 |
| 2.23 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat | 139 |
| 2.24 | Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat | 144 |
| 2.25 | Usulan Program Prioritas Musrenbang Tahun 2022 untuk RKPD Tahun 2023 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat | 157 |
| 3.1 | Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong Setelah Perubahan Tahun 2018 – 2023 ... | 182 |
| 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat | 190 |





DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------|--|-----|
| 2.1 | Capaian Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021 | 38 |
| 2.2 | Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021 | 46 |
| 2.3 | Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2021 Kecamatan Kiaracondong | 49 |
| 2.4 | Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2021 terhadap Renstra 2023 Kecamatan Kiaracondong | 51 |
| 2.5 | Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan Tahun 2021 | 59 |
| 2.6 | Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021 | 72 |
| 2.7 | Capaian Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan 2022 | 91 |
| 2.8 | Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan 2022 | 99 |
| 2.9 | Capaian Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Menunjang RPJMD terealisasi Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan Tahun 2022 | 100 |
| 2.10 | Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2022 terhadap Renstra 2023 Kecamatan Kiaracondong | 106 |
| 2.11 | Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan Tahun 2022 | 114 |
| 2.12 | Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan 2022 | 128 |





DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----|--|-----|
| 1.1 | Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD | 2 |
| 3.1 | Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung | 174 |

DAFTAR DIAGRAM

| | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022 | 86 |
|-----|--|----|



SEMANG SIPAU WISAWA MUKTI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Selain hal tersebut, RKPD juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

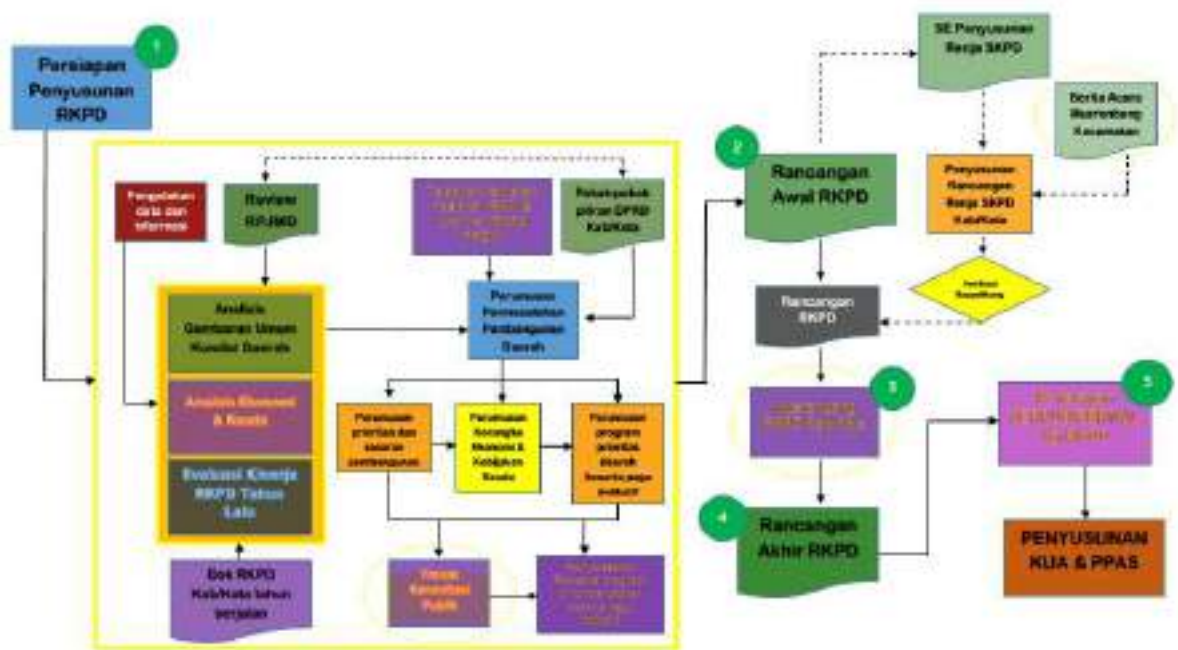
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023. RKPD Kecamatan Kiaracondong disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan

musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD, dengan siklus yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD





Secara garis besar tahapan dan tata cara penyusunan RKPD sebagaimana tergambar dalam gambar 1.1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD melalui tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu :

- a. Tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup :
 - 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- b. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappelitbang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan , lokasi , dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.





- c. Rancangan awal RKPD dibahas dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbang dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:

- a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan
- b. Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
- b. Menyepakati prioritas pembangunan daerah;
- c. Menyepakati program, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi;
- d. Penyelarasan program dan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. Klarifikasi program dan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perwal tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD

Rancangan Perwal tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappelitbang kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah





untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang RKPD dijadikan sebagai :

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama *pendekatan teknokratis*, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua *pendekatan partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga *pendekatan politis*, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat *pendekatan bawah-atas (bottom-up)* dan *atas-bawah (top-down)* dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, *pendekatan holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, *pendekatan integratif*, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, *pendekatan spasial*, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2023 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun keempat dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, RKPD Kota Bandung Tahun 2023

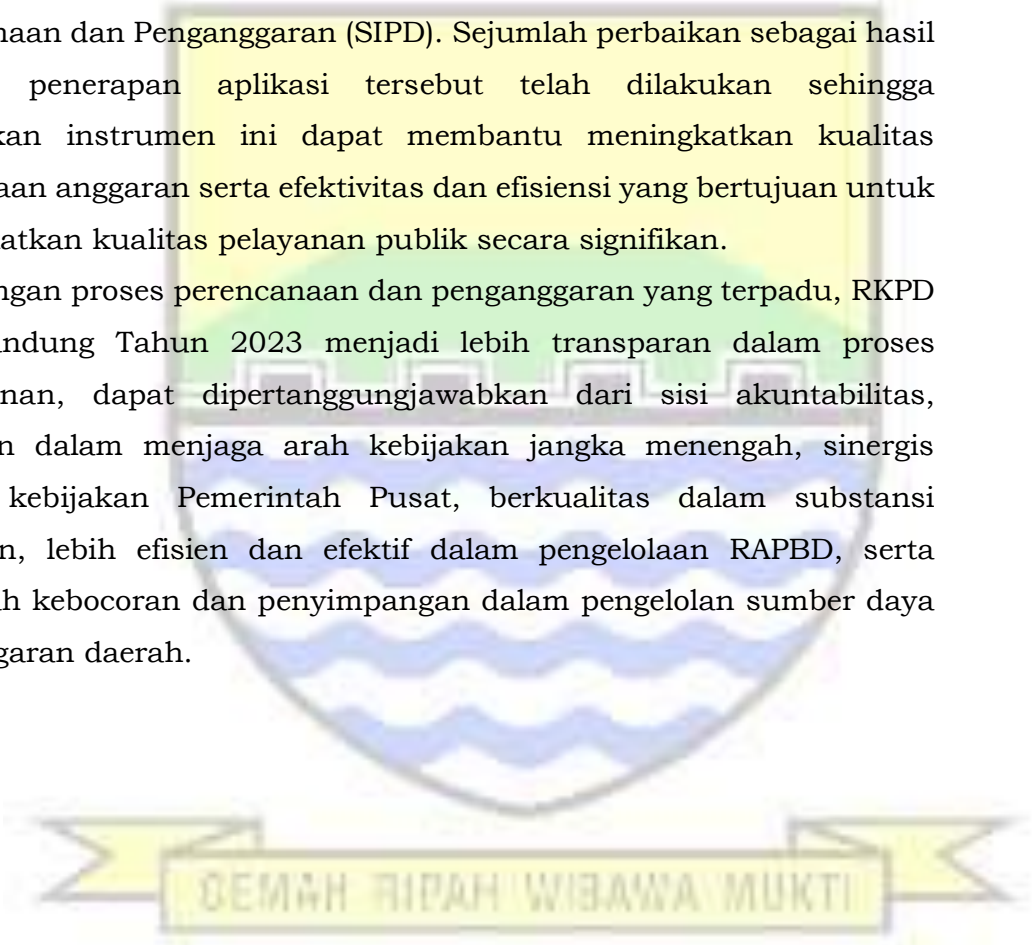




harus menjadi pondasi yang kokoh untuk merealisasikan target kinerja serta janji wali kota/wakil wali kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPD). Sejumlah perbaikan sebagai hasil evaluasi penerapan aplikasi tersebut telah dilakukan sehingga diharapkan instrumen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, RKPD Kota Bandung Tahun 2023 menjadi lebih transparan dalam proses penyusunan, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam substansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan RAPBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.





1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Kecamatan Kiaracondong dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RKPD Kota Bandung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
11. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;





26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08 Noreg. Peraturan Daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat: (8/294/2016));
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
31. Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkup Pemerintah Kota Bandung.
32. Peraturan Walikota Bandung Nomor 89 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2023 adalah :

1. Membuat dokumen rencana kerja pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung selama kurun waktu satu tahun 2023 yang merupakan penjabaran RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah.
2. Mendokumentasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2023 adalah :

1. Menyediakan pedoman/acuan pelaksanaan program dan bagi seluruh Perangkat Daerah khususnya di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
2. Menyediakan pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2023.
3. Sebagai bahan pengendalian, evaluasi , dan pengukuran tingkat kinerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD khususnya di Kecamatan Kiaracondong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Capaian Renstra Kecamatan Kiaracondong

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kiaracondong Kota Bandung Nomor : 900/Kep.25 - Kec.Kc/XII/2021 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimuat program dan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran adalah sebagai berikut :





| Tujuan | Sasaran |
|---|--|
| 1. Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat | 1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong |
| | 2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong |
| 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | 3. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong |
| | 4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong |

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2021 dan tahun 2022 :

**Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong | Persentase Siskamling RW Aktif | % | 95,29 |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | % | 74,00 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | Nilai | 83,00 |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong | Persentase Kelurahan Unggul | % | 66,67 |



**Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong | Persentase Siskamling RW Aktif | % | 96,47 |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | % | 75,00 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | Nilai | 84,25 |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong | Persentase Kelurahan Unggul | % | 83,33 |

Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2021

Capaian kinerja keuangan tahun 2021 pelaksanaan program dan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan Belanja Operasi adalah sebesar Rp.26.763.253.099,- sedangkan realisasi anggaran tahun 2021 mencapai Rp.24.448.352.809,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,35 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :



**Pagu dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021**

| No. | Sasaran | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|-----|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Sasaran 1 | 1.659.504.800 | 1.562.023.150 | 94,13 |
| 2 | Sasaran 2 | 6.586.305.130 | 6.271.625.670 | 95,22 |
| 3 | Sasaran 3 | 12.796.884.570 | 11.070.442.499 | 86,51 |
| 4 | Sasaran 4 | 5.720.558.599 | 5.544.261.490 | 96,92 |
| | Jumlah | 26.763.253.099 | 24.448.352.809 | 91,35 |

Adapun rincian program, pagu anggaran dan realisasi anggaran serta output terkait dengan pencapaian target kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

**PROGRAM, PAGU ANGGARAN, REALISASI SERTA OUTCOME/OUTPUT
KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2021**

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | OUTCOME / OUTPUT | % |
|----|--|----------------------|----------------------|--|--------------|
| I | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.659.504.800 | 1.562.023.150 | Persentase Siskamling RW Aktif | 94,13 |
| | <i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i> | <i>1.659.504.800</i> | <i>1.562.023.150</i> | <i>Jumlah siskamling RW se Kecamatan terbina</i> | <i>94,13</i> |
| | 1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1.659.504.800 | 1.562.023.150 | Jumlah pembinaan siskamling RW | 94,13 |
| II | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 6.586.305.130 | 6.271.625.670 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | 95,22 |
| | <i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i> | <i>6.483.070.130</i> | <i>6.174.608.620</i> | <i>Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dan RW terbina</i> | <i>95,24</i> |





| | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| | 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 5.716.583.930 | 5.456.306.090 | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi | 95,45 |
| | 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 766.486.200 | 718.302.530 | Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi | 93,71 |
| | <i>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i> | <i>103.235.000</i> | <i>97.017.050</i> | <i>Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina</i> | <i>93,98</i> |
| | 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 90.535.000 | 85.716.550 | Jumlah posyandu purnama se Kecamatan terbina | 94,68 |
| | 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 12.700.000 | 11.300.500 | Jumlah UKM se Kecamatan terbina | 88,98 |
| III | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 12.796.884.570 | 11.070.442.499 | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 86,51 |
| | <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>10.021.870.761</i> | <i>8.950.289.399</i> | <i>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>89,31</i> |
| | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.021.870.761 | 8.950.289.399 | | 89,31 |
| | <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>620.740.909</i> | <i>530.540.320</i> | <i>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>85,47</i> |
| | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 4.253.000 | 3.137.000 | | 73,76 |
| | 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 363.857.620 | 321.310.850 | | 88,31 |
| | 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 29.239.600 | 17.509.000 | | 59,88 |
| | 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 135.771.400 | 123.646.320 | | 91,07 |
| | 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 63.959.289 | 44.702.950 | | 69,89 |





| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---|--------------|
| | 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 23.660.000 | 20.234.200 | | 85,52 |
| | 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>1.033.339.800</i> | <i>969.395.980</i> | <i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>93,81</i> |
| | 1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 175.865.600 | 113.216.880 | | 64,38 |
| | 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 857.474.200 | 856.179.100 | | 99,85 |
| | <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>1.120.933.100</i> | <i>620.216.800</i> | <i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>55,33</i> |
| | 1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 528.896.200 | 437.628.600 | | 82,74 |
| | 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13.317.900 | 7.686.000 | | 57,71 |
| | 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 578.719.000 | 174.902.200 | | 30,22 |
| IV | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 5.720.558.599 | 5.544.261.490 | Persentase Kelurahan Unggul | 96,92 |
| | <i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | <i>2.644.800.000</i> | <i>2.638.500.000</i> | | <i>99,76</i> |
| | 1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2.644.800.000 | 2.638.500.000 | | 99,76 |
| | <i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i> | <i>24.384.300</i> | <i>14.829.530</i> | | <i>60,82</i> |



| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| 1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 24.384.300 | 14.829.530 | | 60,82 |
| <i>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i> | <i>2.073.596.594</i> | <i>2.032.816.160</i> | | <i>98,03</i> |
| 1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 2.073.596.594 | 2.032.816.160 | | 98,03 |
| <i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i> | <i>977.777.705</i> | <i>858.115.800</i> | | <i>87,76</i> |
| 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 977.777.705 | 858.115.800 | | 87,76 |
| JUMLAH | 26.763.253.099 | 24.448.352.809 | | 91,35 |

Sumber : Data SIMDA per 31 Desember 2021 setelah rekonsiliasi

Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022

Capaian kinerja keuangan tahun 2022 pelaksanaan program dan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan Belanja Operasi adalah sebesar Rp.33.103.734.138,- sedangkan realisasi anggaran tahun 2022 mencapai Rp.31.275.943.173,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,48 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :



**Pagu dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022**

| No. | Sasaran | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|-----|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Sasaran 1 | 1.741.359.250 | 1.652.882.420 | 94,92 |
| 2 | Sasaran 2 | 10.962.776.251 | 10.348.699.500 | 94,40 |
| 3 | Sasaran 3 | 14.736.213.777 | 13.718.743.573 | 93,10 |
| 4 | Sasaran 4 | 5.663.384.860 | 5.555.617.680 | 98,10 |
| | Jumlah | 33.103.734.138 | 31.275.943.173 | 94,48 |

Adapun rincian program, pagu anggaran dan realisasi anggaran serta output terkait dengan pencapaian target kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | OUTCOME / OUTPUT | % |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---|--------------|
| I | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.741.359.250 | 1.652.882.420 | Persentase Siskamling RW Aktif | 94,92 |
| | <i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i> | 1.741.359.250 | 1.652.882.420 | <i>Jumlah siskamling RW se Kecamatan terbina</i> | 94,92 |
| | 1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1.741.359.250 | 1.652.882.420 | Jumlah pembinaan siskamling RW | 94,92 |
| II | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 10.962.776.251 | 10.348.699.500 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | 94,40 |
| | <i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 10.699.684.651 | 10.108.458.866 | <i>Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan Kelurahan terbina</i> | 94,47 |
| | 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 8.925.969.691 | 8.555.267.221 | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi | 95,85 |





| | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| | 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.773.714.960 | 1.553.191.645 | Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi | 87,57 |
| | <i>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i> | 263.091.600 | 240.240.634 | <i>Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina</i> | 91,31 |
| | 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 238.195.600 | 221.045.634 | Jumlah posyandu purnama se Kecamatan terbina | 92,80 |
| | 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 24.896.000 | 19.195.000 | Jumlah UKM se Kecamatan terbina | 77,10 |
| III | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 14.736.213.777 | 13.718.743.573 | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 93,10 |
| | <i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 73.185.200 | 73.015.800 | <i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 99,77 |
| | 1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 73.185.200 | 73.015.800 | | 99,77 |
| | <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 10.916.682.853 | 10.299.741.488 | <i>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 94,35 |
| | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.916.682.853 | 10.299.741.488 | | 94,35 |
| | <i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 42.152.250 | 40.139.820 | <i>Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 95,23 |
| | 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 42.152.250 | 40.139.820 | | 95,23 |
| | <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 624.000.709 | 485.011.280 | <i>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 77,73 |
| | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 9.787.500 | 7.565.500 | | 77,30 |
| | 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 144.834.600 | 109.151.665 | | 75,36 |



| | | | | |
|---|----------------------|--------------------|---|--------------|
| 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 41.400.300 | 28.548.960 | | 68,96 |
| 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 218.684.400 | 189.192.375 | | 86,51 |
| 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 71.029.909 | 36.825.300 | | 51,84 |
| 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24.120.000 | 20.978.000 | | 86,97 |
| 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 114.144.000 | 92.749.480 | | 81,26 |
| <i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>1.049.721.582</i> | <i>966.590.785</i> | <i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>92,08</i> |
| 1. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 477.855.000 | 428.850.000 | | 89,74 |
| 2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | 118.027.521 | 109.014.210 | | 92,36 |
| 3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 353.839.061 | 329.098.525 | | 93,01 |
| 4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.000.0000 | 99.628.050 | | 99,63 |
| <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>1.008.329.510</i> | <i>956.018.997</i> | <i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>94,81</i> |
| 1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 166.929.510 | 125.263.397 | | 75,04 |
| 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 841.400.000 | 830.755.600 | | 98,73 |
| <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>1.022.141.673</i> | <i>898.225.403</i> | <i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>87,88</i> |





| | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| | 1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 674.631.700 | 583.964.050 | | 86,56 |
| | 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.784.800 | 19.450.550 | | 65,30 |
| | 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 317.725.173 | 294.810.803 | | 92,79 |
| IV | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 5.663.384.860 | 5.555.617.680 | Persentase Kelurahan Unggul | 98,10 |
| | <i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | <i>2.644.978.000</i> | <i>2.644.646.000</i> | | <i>99,99</i> |
| | 1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2.644.978.000 | 2.644.646.000 | | 99,99 |
| | <i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i> | <i>111.792.800</i> | <i>94.328.200</i> | | <i>84,38</i> |
| | 1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 111.792.800 | 94.328.200 | | 84,38 |
| | <i>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i> | <i>2.162.758.060</i> | <i>2.147.381.050</i> | | <i>99,29</i> |
| | 1. Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 2.162.758.060 | 2.147.381.050 | | 99,29 |
| | <i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i> | <i>743.856.000</i> | <i>669.262.430</i> | | <i>89,97</i> |
| | 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 743.856.000 | 669.262.430 | | 89,97 |
| | JUMLAH | 33.103.734.138 | 31.275.943.173 | | 94,48 |





Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan tahun 2021 dan tahun 2022 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan RKPd tahun 2021 dan tahun 2022 serta realisasi capaian kinerja misi RPJMD tahun ketiga, untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Siskamling RW Aktif | 98,82 % | 95,29 % | 96,47 % | 96,47 % | 100 | 98,82 % | 96,47 % | 97,62 % |
| 7.01.04.2.02 | Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Siskamling RW yang terbina | 84 siskamling RW | 81 siskamling RW | 82 siskamling RW | 82 siskamling RW | 100 | 84 siskamling RW | 82 siskamling RW | 97,62 % |
| 7.01.04.2.02.01 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah pembinaan siskamling RW | 12 lap | 4 lap | 4 lap | 4 lap | 100 | 4 lap | 8 lap | 66,67 % |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | 76,00 % | 74,75 % | 75,00 % | 75,73 % | 100,97 | 76,00 % | 75,73 % | 99,64 % |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan dan RW terbina | 78 lembaga dan RW | 77 lembaga dan RW | 77 lembaga dan RW | 78 lembaga dan RW | 101,30 | 78 lembaga dan RW | 78 lembaga dan RW | 100 % |
| 7.01.03.2.02.02 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di | 850 kegiatan | 251 kegiatan | 417 kegiatan | 417 kegiatan | 100 | 465 kegiatan | 668 kegiatan | 78,59 % |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | Kelurahan terrealisasi | | | | | | | | |
| 7.01.03. 2.02.03 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terrealisasi | 198 kegiatan | 60 kegiatan | 174 kegiatan | 174 kegiatan | 100 | 160 kegiatan | 234 kegiatan | 118,18 % |
| 7.01.03. 2.03 | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina | 291 unit | 89 unit | 96 unit | 96 unit | 100 | 106 unit | 185 unit | 63,57 % |
| 7.01.03. 2.03.01 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Posyandu Purnama | 280 unit | 87 unit | 93 unit | 93 unit | 100 | 100 unit | 180 unit | 64,29 % |
| 7.01.03. 2.03.04 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah UKM yang terbina | 11 unit | 2 unit | 3 unit | 3 unit | 100 | 6 unit | 5 unit | 45,45 % |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 90 % | 86,51 % | 90 % | 93,10 % | 103,44 | 90 % | 93,10 % | 103,44 % |
| 7.01.01. 2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 % | * | 90 % | 99,77 % | 110,86 | 90 % | 99,77 % | 110,86 % |
| 7.01.01. 2.01.07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 2 laporan | * | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 1 laporan | 1 laporan | 50,00 % |
| 7.01.01. 2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 90 % | 89,31 % | 90 % | 94,35 % | 104,83 | 90 % | 94,35 % | 104,83 % |
| 7.01.01. 2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan penyediaan gaji dan | 36 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100 | 12 laporan | 24 laporan | 66,67 % |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | tunjangan ASN tepat waktu | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 laporan | * | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 1 laporan | 1 laporan | 50,00 % |
| 7.01.01.2.05.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 2 laporan | * | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 1 laporan | 1 laporan | 50,00 % |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90 % | 85,47 % | 90 % | 77,73 % | 86,37 | 90 % | 85,47 % | 94,97 % |
| 7.01.01.2.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 12 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 100 | 4 laporan | 8 laporan | 66,67 % |
| 7.01.01.2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 100 | 4 laporan | 8 laporan | 66,67 % |
| 7.01.01.2.06.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 100 | 4 laporan | 8 laporan | 66,67 % |
| 7.01.01.2.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor | 12 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 100 | 4 laporan | 8 laporan | 66,67 % |
| 7.01.01.2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 100 | 4 laporan | 8 laporan | 66,67 % |
| 7.01.01.2.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 12 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 100 | 4 laporan | 8 laporan | 66,67 % |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 7.01.01.2.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur | 90 % | * | 90 % | 81,26 % | 90,29 | 90 % | 81,26 % | 90,29 % |
| 7.01.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 % | * | 90 % | 92,12 % | 102,35 | 90 % | 92,12 % | 102,35 % |
| 7.01.01.2.07.01 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan terrealisasi | 0 unit | * | 7 unit | 7 unit | 100 | 0 unit | 7 unit | - |
| 7.01.01.2.07.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terrealisasi | 2 unit | * | 0 unit | 0 unit | 0 | 8 unit | 0 unit | - |
| 7.01.01.2.07.05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah unit mebeulair terrealisasi | 170 unit | * | 105 unit | 105 unit | 100 | 219 unit | 105 unit | 61,76 % |
| 7.01.01.2.07.06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terrealisasi | 60 unit | * | 66 unit | 64 unit | 96,97 | 158 unit | 64 unit | 106,67 % |
| 7.01.01.2.07.09 | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya terrealisasi | 0 unit | * | 1 unit | 1 unit | 100 | 1 unit | 1 unit | - |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 % | 93,81 % | 90 % | 94,81 % | 105,34 | 90 % | 94,81 % | 105,34 % |
| 7.01.01.2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, | 36 jasa bulanan | 12 jasa bulanan | 12 jasa bulanan | 12 jasa bulanan | 100 | 12 jasa bulanan | 24 jasa bulanan | 66,67 % |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 36 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100 | 12 laporan | 24 laporan | 66,67 % |
| 7.01.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 % | 55,33 % | 90 % | 87,88 % | 97,64 | 90 % | 87,88 % | 97,64 % |
| 7.01.01.2.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara | 107 unit | 35 unit | 34 unit | 34 unit | 100 | 36 unit | 69 unit | 64,49 % |
| 7.01.01.2.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terrealisasi | 136 unit | 11 unit | 46 unit | 36 unit | 78,26 | 68 unit | 47 unit | 34,56 % |
| 7.01.01.2.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara | 18 unit | 3 unit | 6 unit | 6 unit | 100 | 5 unit | 9 unit | 50 % |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Kelurahan Unggul | 100 % | 66,67 % | 83,33 % | 83,33 % | 100 | 100 % | 83,33 % | 83,33 % |
| 7.01.02.2.01 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Laporan RT/RW tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 100 % | 100 % | 100,00 % |
| 7.01.02.2.01.02 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas | Jumlah Laporan RT RW tepat waktu | 12 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 100 | 4 laporan | 8 laporan | 66,67 % |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | |
| 7.01.02.2.02 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 100 % | 100 % | 100,00 % |
| 7.01.02.2.02.03 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP | 21 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 100 | 7 jenis | 14 jenis | 66,67 % |
| 7.01.02.2.03 | Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 100 % | 100 % | 100,00 % |
| 7.01.02.2.03.01 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Taman terpelihara | 18 taman | 3 taman | 6 taman | 6 taman | 100 | 6 taman | 9 taman | 50 % |
| | | Panjang jalan dan saluran air terpelihara | 246.756 meter | 81.252 meter | 82.252 meter | 82.252 meter | 100 | 83.252 meter | 163.504 meter | 66,26 % |
| 7.01.02.2.04 | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial | 12 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 100 | 4 laporan | 8 laporan | 66,67 % |
| 7.01.02.2.04.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 36 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100 | 12 laporan | 24 laporan | 66,67 % |



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| Persentase | Predikat | Kode Warna |
|------------|-------------------------|------------|
| < 100% | Tidak Tercapai | Merah |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target | Hijau |
| > 100% | Melebihi Target | Biru |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kiaracondong
Kota Bandung Tahun 2021**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|----|-----------------------|------------------------|------------|
| 1 | Sangat Baik | > 90 | Dark Blue |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 | Green |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 | Orange |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 | Yellow |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 | Red |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2018 - 2023 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Nomor : 900/Kep.28 - Kec.Kc/XII/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator



Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama





Perubahan untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Nomor : 900/Kep.28 - Kec.Kc/XII/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
|----|---|---|--------|-----------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong | Persentase Siskamling RW aktif | 95,29 | 95,29 | 100,00 |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | 74,00 | 74,75 | 101,01 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | 83,00 | 83,40 | 100,48 |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong | Persentase Kelurahan Unggul | 66,67 | 66,67 | 100,00 |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dengan capaian kinerja 101,01 % dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dengan capaian kinerja 100,48 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100,00 % ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif, dan indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 100,00 %.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021**

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN |
|-----------|---------------------------|----------------|
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 50 % |
| 2 | Sesuai Target | 50 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 % |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Pencapaian target Misi

| No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | | |
|-----------|-------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Melampaui target | Sesuai Target | Belum Mencapai Target |



| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
|---|---------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|
| 1 | Misi 1 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Misi 2 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Misi 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Misi 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Misi 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Jumlah | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 |

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

| No | Kategori | Jumlah Indikator | Persentase |
|-----------|---------------------------|------------------|------------|
| A. | Misi 1 | 2 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 1 | 0.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 1 | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 | 0.00 % |
| | | | |
| B. | Misi 2 | 2 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 1 | 0.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 1 | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 | 0.00 % |
| | | | |
| C. | Misi 3 | 0 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | | 0.00 % |
| 2 | Sesuai Target | | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | | 0.00 % |
| | | | |
| D. | Misi 4 | 0 | |

| | | | |
|-----------|---------------------------|----------|--------|
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | | 0.00 % |
| 2 | Sesuai Target | | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | | 0.00 % |
| | | | |
| E. | Misi 5 | 0 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | | 0.00 % |
| 2 | Sesuai Target | | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | | 0.00 % |
| | | | |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2018 - 2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

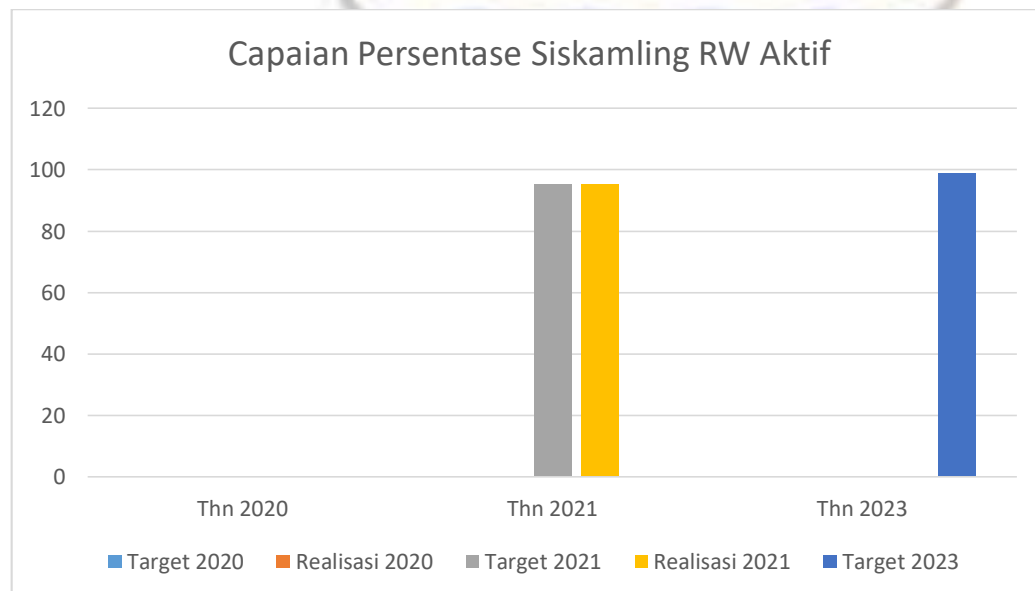
Tabel 2.2

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | % | Tahun 2020 | | % |
|----|--------------------------------|--------|------------|-----------|---|------------|-----------|--------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase Siskamling RW Aktif | % | - | - | - | 95,29 | 95,29 | 100,00 |

Grafik 2.1

Capaian Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021



Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Persentase Siskamling RW Aktif**" adalah sebesar 95,29 % dari target sebesar 95,29 % yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tabel 2.3

Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Tahun 2023 | |
|----|--------------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | % |
| 1 | Persentase Siskamling RW Aktif | % | 95,29 | 95,29 | 100,00 | 98,82 | 96,43 |

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Siskamling RW Aktif" tahun ini adalah sebesar 100,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2023 maka capaian kinerjanya mencapai 96,43 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran koordinasi ketentraman dan ketertiban yang mendukung tercapainya indikator Persentase Siskamling RW Aktif lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-1 Kota Bandung yaitu "*Membangun Masyarakat yang Humanis,*

Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing” adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif adalah persentase jumlah RW yang memiliki (kriteria) Siskamling Aktif dibagi dengan jumlah seluruh RW di Kecamatan.

3. Kinerja nyata dengan Rencana :

Hasil kinerja nyata indikator Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 adalah sebesar 95,29 % dari target sebesar 95,29 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil pencapaian Persentase Siskamling RW Aktif, pada Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :

| Wilayah | Jumlah RW | Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW aktif | % | Keterangan |
|----------------------------|-----------|--|-------|--|
| Kelurahan Sukapura | 15 | 15 | 17,65 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif |
| Kelurahan Kebon Jayanti | 14 | 11 | 12,94 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif sebesar 78,57% |
| Kelurahan Babakan Surabaya | 15 | 15 | 17,65 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif |
| Kelurahan Cicaheum | 12 | 11 | 12,94 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif sebesar 91,67% |
| Kelurahan Babakansari | 18 | 18 | 21,17 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif |



| | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------|---|
| Kelurahan Kebon Kangkung | 11 | 11 | 12,94 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif |
| Jumlah | 85 | 81 | 95,29 | |

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong tahun 2021 sebesar 95,29 % atau 81 RW yang telah memenuhi kriteria siskamling RW aktif dari 85 RW yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong tahun 2021 sebesar 95,29 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2020 tidak dapat dibandingkan, karena indikator kinerja ini baru terlaksana di tahun 2021.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 1 Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong tahun 2021 adalah sebesar 95,29 % bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangla menengah (akhir Renstra) tahun 2023 sebesar 98,82 % baru mencapai 96,43 %. Untuk mencapai target kinerja tersebut maka untuk meningkatkan kinerja yang optimal diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Perbandingan Persentase Siskamling RW Aktif Tahun 2021 dengan instansi lainnya :

| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|----|-----------|--------------------------------|-----------|---------|
| | | PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | ANDIR | 50,00 | 50,00 | 100,00 |





| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 2 | ANTAPANI | 76,00 | 100,00 | 131,58 |
| 3 | ARCAMANIK | 81,13 | 81,48 | 100,43 |
| 4 | ASTANAANYAR | 51,00 | 57,00 | 111,76 |
| 5 | BABAKAN CIPARAY | 50,87 | 50,87 | 100,00 |
| 6 | BATUNUNGGAL | 72,28 | 75,80 | 104,87 |
| 7 | BANDUNG KIDUL | 65,00 | 100,00 | 153,85 |
| 8 | BANDUNG KULON | 65,00 | 74,66 | 114,85 |
| 9 | BANDUNG WETAN | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 10 | BUAH BATU | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 11 | BOJONGLOA KALER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | BOJONGLOA KIDUL | 68,18 | 68,18 | 100,00 |
| 13 | CIBEUNYING KALER | 50,00 | 54,35 | 108,70 |
| 14 | CIBEUNYING KIDUL | 40,23 | 44,83 | 111,43 |
| 15 | CIBIRU | 50,94 | 50,94 | 100,00 |
| 16 | CICENDO | 69,64 | 69,64 | 100,00 |
| 17 | CIDADAP | 34,48 | 41,37 | 119,98 |
| 18 | CINAMBO | 91,25 | 92,00 | 100,82 |
| 19 | COBLONG | 65,00 | 100,00 | 153,85 |
| 20 | GEDE BAGE | 85,00 | 85,00 | 100,00 |
| 21 | KIARACONDONG | 95,29 | 95,29 | 100,00 |
| 22 | LENGKONG | 55,92 | 56,34 | 100,75 |
| 23 | RANCASARI | 80,00 | 82,44 | 103,05 |
| 24 | REGOL | 76,67 | 76,67 | 100,00 |
| 25 | MANDALAJATI | 56,00 | 56,60 | 101,07 |
| 26 | SUKASARI | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 27 | SUKAJADI | 63,27 | 63,27 | 100,00 |
| 28 | SUMUR BANDUNG | 51,35 | 51,35 | 100,00 |
| 29 | UJUNG BERUNG | 91,53 | 91,53 | 100,00 |
| 30 | PANYILEUKAN | 48,65 | 59,46 | 122,22 |

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 1 Kecamatan Kiaracondong yaitu Persentase Siskamling RW Aktif pada tahun 2021 sebesar 95,29 % dari target 95,29 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Andir, Babakan Ciparay, Bandung Wetan, Buahbatu, Cibiru, Cicendo, Gede Bage, Regol, Sukasari, Sukajadi, Sumur Bandung dan Ujung Berung dengan capaian kerjanya sebesar 100,00 %, maka Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 1 yaitu terdiri atas program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



dan kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar 100 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1 yaitu Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 95,29 %. Realisasi (*inputs*) 95,29 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{95,29}{95,29} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan/sub kegiatan dalam program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

| NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | OUTPUTS | INPUTS | CAPAIAN (%) |
|---|---|------------|------------|--|
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Siskamling RW Aktif | 95,29 % | 95,29 % | $= \frac{95,29\%}{95,29\%} \times 100\% = 100\%$ |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Siskamling RW Aktif | 95,29 % | 95,29 % | $= \frac{95,29\%}{95,29\%} \times 100\% = 100\%$ |
| Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah pembinaan siskamling RW | 12 laporan | 12 laporan | $= \frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100\% = 100\%$ |

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.1.562.023.150,00 atau 94,13 % dari pagu anggaran sebesar Rp.1.659.504.800,00.

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.
4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat :

1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
3. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
4. Wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak terhadap hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Menyusun rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Siskamling RW Aktif dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga masyarakat terkait.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif.



Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

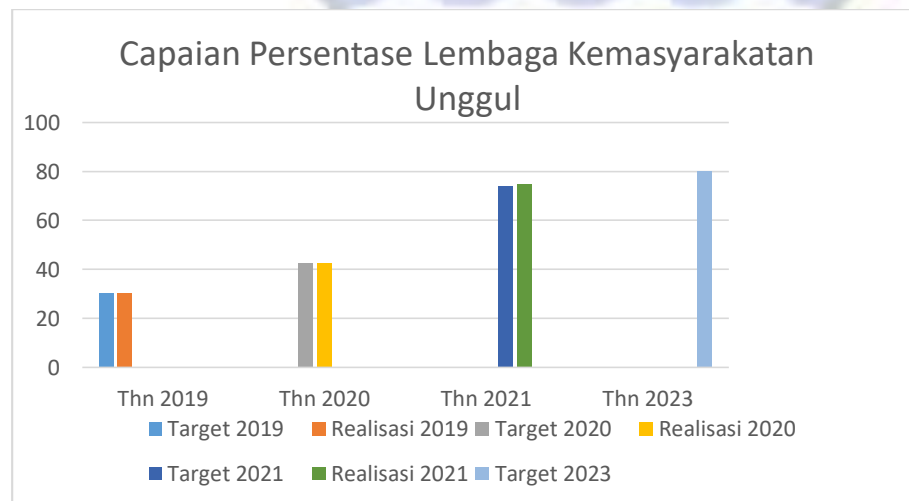
Tabel 2.4

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | % | Tahun 2021 | | % |
|----|--|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | % | 42,56 | 42,56 | 100,00 | 74 | 74,75 | 101,01 |

Grafik 2.2

Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021



Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul**" adalah sebesar 74,75 % dari target sebesar 74,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101,01 %, capaian kinerja ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan. Meskipun telah melampaui target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tabel 2.5

Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Tahun 2023 | |
|----|--|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | % |
| 1 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | % | 74,00 | 74,75 | 101,01 | 76,00 | 98,35 |

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul" tahun ini adalah sebesar 101,01 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong maka capaian kerjanya mencapai 98,35 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran pemberdayaan mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-1 Kota Bandung yaitu “*Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing*” adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Persentase jumlah LKK yang memenuhi kriteria LKK Unggul dibagi dengan jumlah seluruh LKK Kelurahan se-Kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.

3. Kinerja nyata dengan Rencana Perjanjian Kinerja

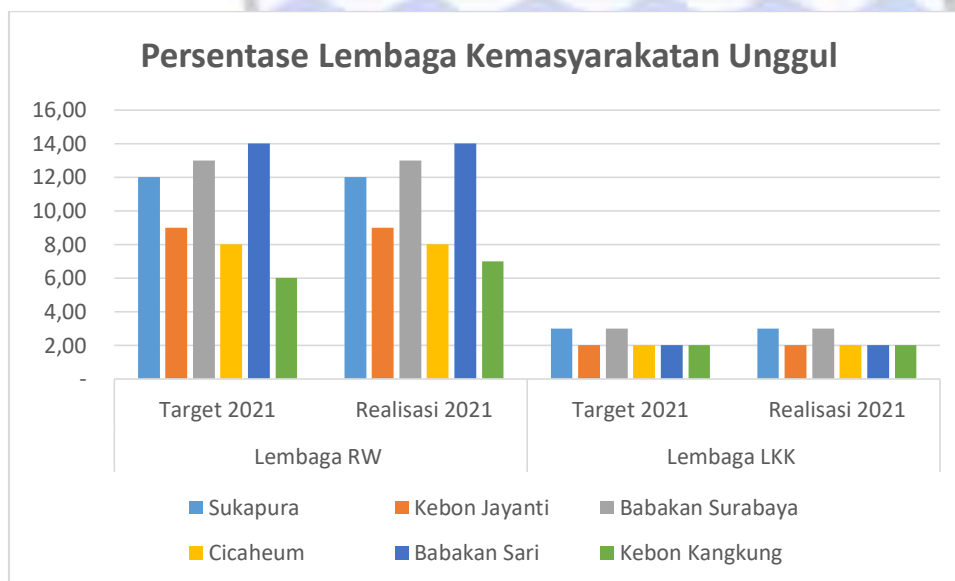
Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :

| Wilayah | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul | Pencapaian |
|---------|---|---|------------|
| | | | |

| Kelurahan | RW | LKK | RW | LKK | Lembaga | % |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Sukapura | 15 | 3 | 12 | 3 | 15 | 14,56 |
| Kebon Jayanti | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 10,68 |
| Babakan Surabaya | 15 | 3 | 13 | 3 | 16 | 15,53 |
| Cicaheum | 12 | 3 | 8 | 2 | 10 | 9,71 |
| Babakansari | 18 | 3 | 14 | 2 | 16 | 15,53 |
| Kebon Kangkung | 11 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8,74 |
| Jumlah | 85 | 18 | 63 | 14 | 77 | 74,75 |
| | 103 | | | | | |

Grafik 2.3

Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2021 Kecamatan Kiaracondong



Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2021 sebesar 74,75 % atau 101,01 % dari target 74,00 % yang diperjanjikan. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul sebesar 74,75 % , merupakan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% dengan rincian kriteria sebagai berikut :

- Lembaga RW Unggul = 61,16 %
- Lembaga LKK Unggul = 13,59 %
- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Unggul = 74,75 %

Pada Tingkat Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kinerjanya ada pada RW Unggul yang mempunyai persentase paling rendah yaitu sebesar 74,12 % atau 63 lembaga yang tercapai unggul dari 85 lembaga yang ada, sedangkan LKK Unggul pencapaian kinerjanya mencapai 77,78 % atau 14 lembaga yang tercapai unggul dari 18 lembaga yang ada.

Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu lembaga LKK Unggul. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada lembaga RW Unggul.

Yang mempengaruhi nilai terendah adalah sebagai berikut :

- Masih banyak pengurus RW dan LKK yang belum mengetahui dan memahami kriteria Lembaga RW Unggul dan lembaga LKK Unggul.
- Adanya refofusing anggaran kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang berdampak dukungan program kerja Wali Kota dan RPJMD menurun.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 175,63 % bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaian kinerjanya sebesar 42,56 %. Hal-hal yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja tersebut diantaranya anggaran kegiatan pemberdayaan telah mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada tahun 2021 adalah sebesar 74,75 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja akhir Renstra tahun 2023 sebesar 76,00 % capaian kinerjanya baru mencapai 98,35%. Untuk mencapai kinerja tersebut agar ditingkatkan kembali

kegiatan pemberdayaan yang mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD sebagai parameter dan indikator kinerja serta fokus kepada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah.

Grafik 2.4

Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2021 terhadap Renstra 2023 Kecamatan Kiaracondong



6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2021 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI PERSENTASE LEMABAGA KEMASYARAKATAN UNGGUL | | |
|----|-----------------|--|-----------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| | | 1 | ANDIR | 56,36 |
| 2 | ANTAPANI | 80,50 | 80,72 | 100,27 |
| 3 | ARCAMANIK | 69,46 | 79,09 | 113,86 |
| 4 | ASTANAANYAR | 71,00 | 74,33 | 104,69 |
| 5 | BABAKAN CIPARAY | 80,00 | 85,03 | 106,29 |
| 6 | BATUNUNGGAL | 72,24 | 90,10 | 124,65 |
| 7 | BANDUNG KIDUL | 65,00 | 75,50 | 116,15 |



| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | PERSENTASE LEMABAGA | | |
| | | KEMASYARAKATAN UNGGUL | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 8 | BANDUNG KULON | 84,00 | 92,23 | 110,99 |
| 9 | BANDUNG WETAN | 84,44 | 84,44 | 100,00 |
| 10 | BUAH BATU | 73,13 | 77,39 | 105,82 |
| 11 | BOJONGLOA KALER | 60,00 | 80,70 | 134,50 |
| 12 | BOJONGLOA KIDUL | 76,35 | 79,56 | 104,20 |
| 13 | CIBEUNYING KALER | 65,52 | 86,96 | 132,72 |
| 14 | CIBEUNYING KIDUL | 51,57 | 65,95 | 127,88 |
| 15 | CIBIRU | 80,50 | 93,85 | 116,58 |
| 16 | CICENDO | 81,60 | 81,60 | 100,00 |
| 17 | CIDADAP | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 18 | CINAMBO | 82,84 | 87,04 | 105,07 |
| 19 | COBLONG | 91,97 | 91,97 | 100,00 |
| 20 | GEDE BAGE | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 21 | KIARACONDONG | 74,00 | 74,75 | 101,01 |
| 22 | LENGKONG | 67,78 | 67,92 | 100,21 |
| 23 | RANCASARI | 77,00 | 84,81 | 110,14 |
| 24 | REGOL | 66,67 | 66,67 | 100,00 |
| 25 | MANDALAJATI | 62,00 | 82,14 | 132,48 |
| 26 | SUKASARI | 81,00 | 83,00 | 102,46 |
| 27 | SUKAJADI | 78,50 | 78,97 | 100,59 |
| 28 | SUMUR BANDUNG | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 29 | UJUNG BERUNG | 60,12 | 61,80 | 102,79 |
| 30 | PANYILEUKAN | 60,00 | 62,55 | 104,25 |

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 2 Kecamatan Kiaracondong Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada tahun 2021 sebesar 74,75 % dari target 74,00 % dengan capaian kinerja sebesar 101,01 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Antapani sebesar 100,27 %, Bandung Wetan, Cicendo, Cidadap, Coblong, Gede Bage, Regol, Sumur Bandung sebesar 100,00 %, Lengkong sebesar 100,21 % dan Kecamatan Sukajadi sebesar 100,59 % dengan capaian kinerjanya sebesar 101,01 %, maka Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 2 yaitu terdiri atas program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan untuk tahun 2021 mencapai 101,01 %. Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 74,00 %. Realisasi (*inputs*) 74,75 % dengan capaian

kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{74,75}{74,00} \times 100\% = 101,01\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 74,00 % sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Realisasi (*inputs*) 74,75 % sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{74,75}{74,00} \times 100\% = 101,01\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong Tahun Anggaran 2021.

| NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | OUTPUTS | INPUTS | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan | 74,00 % | 74,75 % | $\frac{74,75}{74,00} \times 100\% = 101,01\%$ |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan | 74,00 % | 74,75 % | $\frac{74,75}{74,00} \times 100\% = 101,01\%$ |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi | Jumlah lembaga kemasyarakatan RW se Kecamatan Kiaracondong = 85 lembaga | Kelurahan Sukapura = 12 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{12}{103} \times 100\% = 11,65\%$ |



| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | Kelurahan Kebon Jayanti = 9 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{9}{103} \times 100\% = 8,74\%$ |
| | | | Kelurahan Babakan Surabaya = 13 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{13}{103} \times 100\% = 12,62\%$ |
| | | | Kelurahan Cicaheum = 8 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{8}{103} \times 100\% = 7,77\%$ |
| | | | Kelurahan Babakansari = 14 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{14}{103} \times 100\% = 13,59\%$ |
| | | | Kelurahan Kebon Kangkung = 7 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{7}{103} \times 100\% = 6,80\%$ |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi | Jumlah lembaga kemasyarakatan LKK se Kecamatan Kiaracondong = 18 lembaga | Kelurahan Sukapura = 3 lembaga LKK unggul terealisasi | $\frac{3}{103} \times 100\% = 2,91\%$ |
| | | | Kelurahan Kebon Jayanti = 2 lembaga LKK unggul terealisasi | $\frac{2}{103} \times 100\% = 1,94\%$ |
| | | | Kelurahan Babakan Surabaya = 3 lembaga LKK unggul terealisasi | $\frac{3}{103} \times 100\% = 2,91\%$ |
| | | | Kelurahan Cicaheum = 2 lembaga LKK unggul terealisasi | $\frac{2}{103} \times 100\% = 1,94\%$ |





| | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------------|
| | | | Kelurahan Babakansari = 2 lembaga LKK unggul terealisasi | $\frac{2}{103} \times 100\% = 1,94\%$ |
| | | | Kelurahan Kebon Kangkung = 2 lembaga LKK unggul terealisasi | $\frac{2}{103} \times 100\% = 1,94\%$ |

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 89 unit posyandu purnama dan UKM terbina. Realisasi (*inputs*) 89 unit posyandu purnama dan UKM terbina dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{89}{89} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong Tahun Anggaran 2021.

| NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | OUTPUTS | INPUTS | CAPAIAN (%) |
|--|---|---------|--|---|
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan | 74,00 % | 74,75 % | $\frac{74,75}{74,00} \times 100\% = 101,01\%$ |
| Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina | 89 unit | 89 unit | $\frac{89}{89} \times 100\% = 100\%$ |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah posyandu purnama | 87 unit | Kelurahan Sukapura = 18 unit posyandu purnama | $\frac{18}{89} \times 100\% = 20,22\%$ |
| | | | Kelurahan Kebon Jayanti = 13 unit posyandu purnama | $\frac{13}{89} \times 100\% = 14,61\%$ |





| | | | | |
|---|-------------------------|--------|---|--|
| | | | Kelurahan Babakan Surabaya = 19 unit posyandu purnama | $\frac{19}{89} \times 100 \% = 21,35 \%$ |
| | | | Kelurahan Cicaheum = 12 unit posyandu purnama | $\frac{12}{89} \times 100 \% = 13,48 \%$ |
| | | | Kelurahan Babakansari = 15 unit posyandu purnama | $\frac{15}{89} \times 100 \% = 16,85 \%$ |
| | | | Kelurahan Kebon Kangkung = 10 unit posyandu purnama | $\frac{10}{89} \times 100 \% = 11,25 \%$ |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah UKM yang terbina | 2 unit | Kelurahan Kebon Jayanti = 1 unit UKM terbina | $\frac{1}{89} \times 100 \% = 1,12 \%$ |
| | | | Kelurahan Cicaheum = 1 unit UKM terbina | $\frac{1}{89} \times 100 \% = 1,12 \%$ |

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.6.271.625.670,00 atau 95,22 % dari pagu anggaran sebesar Rp.6.586.305.130,00.

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat :

1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
3. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
4. Wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak terhadap hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan yang terkait di Kelurahan untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPJMD dan janji Kepala Daerah.
2. Menyusun rencana kerja yang baik terkait dengan instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.



3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.



Sasaran 3

Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | % | Tahun 2021 | | % |
|----|---|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | Nilai | 82,00 | 83,23 | 101,50 | 83,00 | 83,40 | 100,40 |

Grafik 2.5

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan Tahun 2021



Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong**" adalah sebesar 83,40

dari target sebesar 83,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,48 %, capaian kinerja ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan. Meskipun telah melampaui target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tabel 2.7
Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong
terhadap target Renstra 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Tahun 2023 | |
|----|---|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | % |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | Nilai | 83,00 | 83,40 | 100,48 | 85,25 | 97,83 |

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong" tahun ini adalah sebesar 100,48 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2023 maka capaian kinerjanya mencapai 97,83 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mendukung tercapainya indikator nilai indeks kepuasan masyarakat lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong :

1. **Penjelasan umum dan sasaran indikator**

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus

pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-2 Kota Bandung yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih*” adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong adalah rata-rata nilai IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. Kinerja nyata dengan Rencana :

Hasil kinerja nyata indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 adalah sebesar 83,40 dari target sebesar 83,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 0,40 point yaitu 100,48% atau melebihi/melampaui target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

Nilai Unsur-unsur Pelayanan Gabungan sebagai berikut :



| No. | UNSUR PELAYANAN | NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR) |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | Persyaratan (U1) | 3,24 |
| 2 | Sistem,Mekanisme,dan Prosedur (U2) | 3,22 |
| 3 | Waktu Penyelesaian (U3) | 3,31 |
| 4 | Biaya/Tarif (U4) | 3,89 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) | 3,17 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana (U6) | 3,29 |
| 7 | Perilaku Pelaksana (U7) | 3,37 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8) | 3,12 |
| 9 | Sarana dan Prasarana (U9) | 3,44 |
| 10 | Nilai Unsur Tertinggi | 3,89 |
| 11 | Nilai Unsur Terendah | 3,12 |

Sumber : Kecamatan Kiaracondong jumlah Responden sebanyak : 150 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = \mathbf{3.33}$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKM setelah dikonversi = **83,40**
- Mutu Pelayanan = **B**
- Kinerja unit pelayanan adalah **Baik**

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk

perbaikan adalah pada Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8) karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan, sedangkan posisi nilai tertinggi yang harus tetap dipertahankan adalah Biaya/Tarif (U4).

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Ongkos dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak lagi dikenakan atau dipungut biaya pengurusan sehingga masyarakat dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan dari segi biaya.
2. Sudah menurunnya pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah sebagai berikut :

1. Belum dimaksimalkannya sarana dan prasarana pengaduan dari masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur Pengaduan, Saran dan Masukan

Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan :

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap layanan yang ada di kewilayahan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang ada agar lebih meningkat kinerjanya.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada guna meningkatkan hasil kinerja pelayanan.

Upaya untuk meningkatkan unsur pelayanan :

1. Melakukan evaluasi terhadap SOP pelayanan yang ada agar lebih baik dan efektif.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada agar lebih kompeten.

3. Meningkatkan secara terus menerus pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti pengelolaan pengaduan, saran dan masukan.
4. Menindaklanjuti dengan segera terhadap saran, masukan dan aduan dari masyarakat.

Meskipun telah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya meningkatkan kompetensi petugas layanan sebagai garda terdepan terhadap produk layanan yang diberikan Kecamatan dan Kelurahan sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada Tahun tahun 2021 adalah sebesar 83,40 bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2020 sebesar 83,23 maka mengalami peningkatan sebesar 0,17 point atau capaian mengalami peningkatan sebesar 0,20 % terhadap realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2020. Capaian kinerja nyata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Peningkatan pencapaian kinerja nyata indikator kinerja utama seiring dengan beberapa indikator unsur pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang naik. Hal dapat dilihat dari beberapa unsur (NRR) yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain :

- Unsur (U1) meningkat 0,05 point
- Unsur (U2) meningkat 0,03 point
- Unsur (U3) meningkat 0,16 point
- Unsur (U6) meningkat 0,11 point
- Unsur (U7) meningkat 0,17 point, dan
- Unsur (U9) meningkat 0,24.

Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa unsur pelayanan yang telah dilakukan perbaikan diantaranya waktu penyelesaian, perilaku pelaksana dan sarana prasarana layanan bagi masyarakat.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2021 adalah sebesar 83,40 bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangla menengah (akhir Renstra) tahun 2023 sebesar 85,25 baru mencapai 97,83 %. Untuk mencapai target kinerja tersebut maka perlu dilakukan perbaikan unsur layanan secara terus menerus dan konsisten terhadap pelayanan yang harus diberikan Kecamatan dan Kelurahan kepada masyarakat dan serta perlu ditingkatkan secara maksimal sehingga capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2021 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|----|------------------|----------------------|-----------|---------|
| | | NILAI IKM KECAMATAN | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | ANDIR | 81,70 | 84,67 | 103,63 |
| 2 | ANTAPANI | 86,00 | 88,46 | 102,86 |
| 3 | ARCAMANIK | 83,75 | 84,62 | 101,04 |
| 4 | ASTANAANYAR | 82,50 | 83,81 | 101,59 |
| 5 | BABAKAN CIPARAY | 81,50 | 85,50 | 104,91 |
| 6 | BATUNUNGGAL | 84,30 | 85,46 | 101,38 |
| 7 | BANDUNG KIDUL | 86,00 | 88,05 | 102,38 |
| 8 | BANDUNG KULON | 83,75 | 84,30 | 100,66 |
| 9 | BANDUNG WETAN | 83,00 | 83,18 | 100,22 |
| 10 | BUAH BATU | 83,00 | 83,60 | 100,73 |
| 11 | BOJONGLOA KALER | 83,80 | 84,76 | 101,15 |
| 12 | BOJONGLOA KIDUL | 84,00 | 84,62 | 100,74 |
| 13 | CIBEUNYING KALER | 86,40 | 88,35 | 102,26 |
| 14 | CIBEUNYING KIDUL | 84,35 | 84,57 | 100,26 |
| 15 | CIBIRU | 83,50 | 84,35 | 101,02 |
| 16 | CICENDO | 85,85 | 85,85 | 100,00 |

| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|----|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | NILAI IKM KECAMATAN | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 17 | CIDADAP | 81,21 | 84,27 | 103,77 |
| 18 | CINAMBO | 83,35 | 83,95 | 100,72 |
| 19 | COBLONG | 84,95 | 96,37 | 113,44 |
| 20 | GEDE BAGE | 83,70 | 83,70 | 100,00 |
| 21 | KIARACONDONG | 83,00 | 83,40 | 100,48 |
| 22 | LINGKONG | 85,05 | 85,05 | 100,00 |
| 23 | RANCASARI | 85,00 | 85,96 | 101,13 |
| 24 | REGOL | 83,60 | 85,03 | 101,71 |
| 25 | MANDALAJATI | 82,00 | 83,78 | 102,17 |
| 26 | SUKASARI | 83,00 | 85,70 | 103,25 |
| 27 | SUKAJADI | 83,50 | 83,59 | 100,11 |
| 28 | SUMUR BANDUNG | 83,00 | 84,07 | 101,29 |
| 29 | UJUNG BERUNG | 83,30 | 85,32 | 102,42 |
| 30 | PANYILEUKAN | 85,00 | 85,19 | 100,22 |

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 3 Kecamatan Kiaracondong yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2021 sebesar 83,40 dari target 83,00 dengan capaian kinerja sebesar 100,48 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cicendo, Gede Bage, Lengkong, Sukajadi dan Panyileukan dengan capaian kinerjanya sebesar 100,48 %, maka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 3 yaitu terdiri atas program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100,48 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 83,00. Realisasi (*inputs*) 83,40 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{83,40}{83,00} \times 100\% = 100,48\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong.



Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/ kegiatan dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

| NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN | OUTPUTS | INPUTS | CAPAIAN (%) |
|--|--|----------|----------|---|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 12 lap | 12 lap | $\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |





| | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 jasa bulanan | 12 jasa bulanan | $\frac{12 \text{ jb}}{12 \text{ jb}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12 lap | 12 lap | $\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Persentase unit kendaraan dinas/operasi | 90,00 % | 90,00 % | $\frac{90,00}{90,00} \times 100 \% = 100,00 \%$ |



| | | | | |
|--|---|--------|--------|---|
| Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | nal yang terpelihara | | | |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara | 3 unit | 3 unit | $\frac{3 \text{ unit}}{3 \text{ unit}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 11.070.442.499,- atau 86,51 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.796.884.570,-.

Dengan nilai sasaran target yang sudah kami tentukan ada beberapa kendala yang kami alami untuk mendapatkan nilai yang objektif di antaranya :

1. Tidak semua warga masyarakat penerima pelayanan, memahami pentingnya pelaksanaan IKM, sehingga tidak jarang masyarakat penerima pelayanan tidak bersedia untuk mengisi kuisisioner yang kami berikan.
2. Masyarakat yang mengisi kuisisioner yang kami berikan sering kali tidak mengisinya dengan objektif sesuai dengan apa yang dirasakan dari pelayanan yang diterima.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan maka perlu menindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana aksi serta anggaran untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan.
2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
3. Adanya anggaran perubahan dari dampak wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan sehingga perlu dilakukan refofusing anggaran berakibat hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Menyusun rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang terkait.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.



Sasaran 4

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

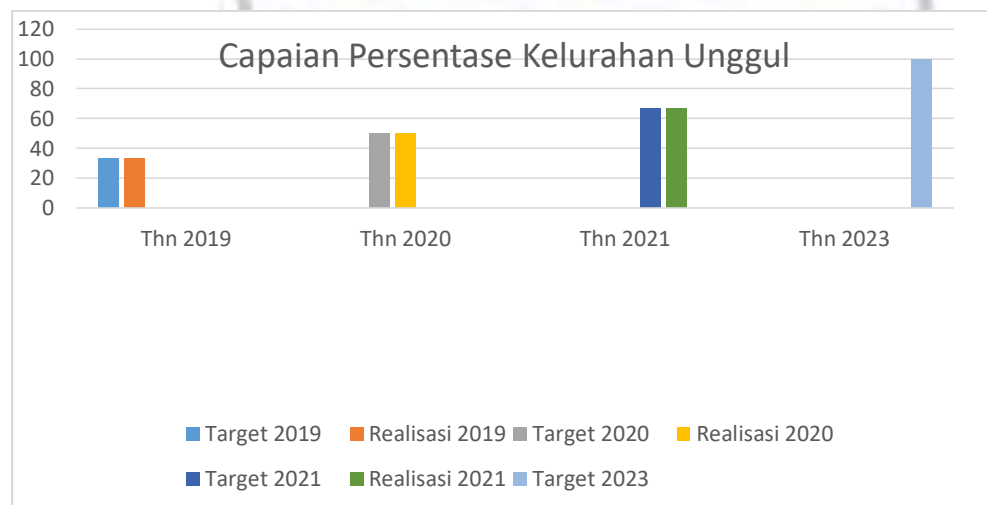
Tabel 2.8

Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong

| No | Indikator Kinerja | Sat | Tahun 2020 | | % | Tahun 2021 | | % |
|----|-----------------------------|-----|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase Kelurahan Unggul | % | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 66,67 | 66,67 | 100,00 |

Grafik 2.6

Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021



Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator " **Persentase Kelurahan Unggul** " adalah sebesar 66,67 % dari target sebesar 66,67 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian kinerja ini sesuai target yang diperjanjikan. Meskipun telah sesuai dengan target yang dicapai, berbagai

upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tabel 2.9

Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Kiaracondong terhadap target Renstra 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Tahun 2023 | |
|----|-----------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | % |
| 1 | Persentase Kelurahan Unggul | % | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 66,67 |

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong maka capaian kerjanya mencapai 66,67 %.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-2 Kota Bandung yaitu "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih*" adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul adalah Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul diantaranya memenuhi atau melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi kegiatan diantaranya :

- 1) Pojok Baca / Taman Baca;
- 2) Gerakan menyemarakkan tempat ibadah;
- 3) Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan;
- 4) Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perKelurahan;
- 5) Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak);
- 6) Pembuatan Septic Tank Komunal;
- 7) Kegiatan KangPisman;
- 8) Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan;
- 9) Pembentukan Koperasi ditempat ibadah;
- 10) Laporan RT dan RW tepat waktu.

3. Kinerja nyata dengan Rencana

Realisasi capaian indikator kinerja **Persentase Kelurahan Unggul** tahun 2021 sebesar 66,67 % atau 100,00 % dari target 66,67 % yang diperjanjikan. Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2021 sebesar 66,67 %, merupakan persentase jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi jumlah Kelurahan dengan rincian kriteria sebagai berikut : Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sebanyak 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya, Kelurahan Kebon Kangkung dan Kelurahan Sukapura dari 6 Kelurahan se-Kecamatan Kiaracondong, sementara 2 Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Cicaheum dan Kelurahan Kebon Jayanti belum memenuhi sebagai kriteria Kelurahan Unggul, sehingga pencapaian baru 66,67 %.



Kriteria Persentase Kelurahan Unggul sebagai berikut :

| No | Jenis Kondisi | Kelurahan Sukapura | Kelurahan Kebon Jayanti | Kelurahan Babakan Surabaya | Kelurahan Cicaheum | Kelurahan Babakan Sari | Kelurahan Kebon Kangkung |
|--|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Pojok Baca / Taman Baca | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana |
| 2 | Gerakan menyemarakkan tempat ibadah | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana |
| 3 | Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| 4 | Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana |
| 5 | Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak) | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana |
| 6 | Septic Tank Komunal | Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana |
| 7 | Kegiatan KangPisman, memenuhi salah satu atau lebih | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana |
| 8 | Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| 9 | Pembentukan Koperasi ditempat ibadah | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana |
| 10 | Laporan RT dan RW tepat waktu | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| Jumlah jenis/ kondisi yang memenuhi/ melaksanakan | | 6 jenis kondisi | 4 jenis kondisi | 6 jenis kondisi | 4 jenis kondisi | 6 jenis kondisi | 5 jenis kondisi |
| Kriteria Kelurahan | | Kelurahan Unggul | Kelurahan Belum Unggul | Kelurahan Unggul | Kelurahan Belum Unggul | Kelurahan Unggul | Kelurahan Unggul |

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul pada Tahun 2021 adalah sebesar 66,67 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2020 sebesar 50,00 % mengalami

kenaikan sebesar 16,67 % terhadap realisasi tahun 2020 atau capaian kinerjanya meningkat sebesar 33,33 % terhadap capaian kinerja tahun 2020. Meskipun sudah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mempertahankan kondisi kegiatan yang menjadi parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang telah mencapai, sedangkan bagi Kelurahan yang belum unggul akan ditingkatkan terus kondisi kegiatannya sehingga menjadi Kelurahan Unggul.

5. Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan

Pencapaian hasil kinerja tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100,00 %, dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong sebesar 100,00 % maka capaian kinerjanya baru mencapai 66,67 %. Untuk mencapai target kinerja akhir Renstra maka perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kondisi kegiatan yang menjadi kriteria atau parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang belum unggul.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Persentase Kelurahan Unggul tahun 2021 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, adalah sebagai berikut :

| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|----|-----------------|-----------------------------|-----------|---------|
| | | PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | ANDIR | 38,46 | 80,00 | 208,01 |
| 2 | ANTAPANI | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 3 | ARCAMANIK | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 4 | ASTANAANYAR | 50,00 | 66,67 | 133,34 |
| 5 | BABAKAN CIPARAY | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 6 | BATUNUNGGAL | 62,50 | 78,54 | 125,66 |
| 7 | BANDUNG KIDUL | 75,00 | 84,50 | 112,67 |
| 8 | BANDUNG KULON | 62,50 | 62,50 | 100,00 |
| 9 | BANDUNG WETAN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | BUAH BATU | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 11 | BOJONGLOA KALER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | BOJONGLOA KIDUL | 66,67 | 66,67 | 100,00 |

| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|-----------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 13 | CIBEUNYING KALER | 50,00 | 100,00 | 200,00 |
| 14 | CIBEUNYING KIDUL | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 15 | CIBIRU | 50,00 | 100,00 | 200,00 |
| 16 | CICENDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | CIDADAP | 66,66 | 66,66 | 100,00 |
| 18 | CINAMBO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | COBLONG | 69,57 | 69,57 | 100,00 |
| 20 | GEDE BAGE | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 21 | KIARACONDONG | 66,67 | 66,67 | 100,00 |
| 22 | LENGKONG | 85,71 | 85,71 | 100,00 |
| 23 | RANCASARI | 75,00 | 100,00 | 133,33 |
| 24 | REGOL | 42,86 | 42,86 | 100,00 |
| 25 | MANDALAJATI | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 26 | SUKASARI | 50,00 | 71,16 | 142,32 |
| 27 | SUKAJADI | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 28 | SUMUR BANDUNG | 75,00 | 100,00 | 133,33 |
| 29 | UJUNG BERUNG | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 30 | PANYILEUKAN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 4 Kecamatan Kiaracondong yaitu Persentase Kelurahan Unggul pada tahun 2021 sebesar 66,67% dari target 66,67% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Cibeunying Kidul, Regol, Mandalajati, Sukajadi dan Ujung Berung dengan capaian kerjanya sebesar 100,00%, maka Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 4 yaitu terdiri atas program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk tahun 2021 mencapai 100,00 %.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 66,67%. Realisasi (*inputs*) 66,67% dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{66,67\%}{66,67\%} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik dalam RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

| NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | OUTPUTS | INPUTS | CAPAIAN (%) |
|---|--|-------------|-------------|---|
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Kelurahan Unggul | 6 Kelurahan | 4 Kelurahan | $= \frac{\text{Memenuhi kriteria}}{\text{Target Kel Unggul}} \times 100 \%$ $= \frac{4 \text{ Kel}}{6 \text{ Kel}} \times 100\% = 66,67 \%$ |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase laporan RT/RW tepat waktu | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan RT RW tepat waktu | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase pelayanan kependudukan tepat waktu sesuai SOP | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah pelayanan kependudukan tepat waktu sesuai SOP | 7 jenis | 7 jenis | $\frac{7 \text{ jenis}}{7 \text{ jenis}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |



| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | - Jumlah taman terpelihara - Panjang ruas jalan saluran air terpelihara | - 3 taman - 81.252 m | - 3 taman - 81.252 m | $= \frac{3 \text{ tmn}}{3 \text{ tmn}} \times 100\% = 100,00 \%$ $= \frac{81.252 \text{ m}}{81.252 \text{ m}} \times 100\% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang di kesejahteraan sosial | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 12 lap | 12 lap | $\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 5.544.261.490,- atau 96,92 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.720.558.599,-.

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
3. Adanya anggaran perubahan dari dampak wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan sehingga perlu dilakukan refofusing anggaran berakibat hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga yang terkait untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul agar 10 jenis kondisi kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPJMD dan janji Kepala Daerah.
2. Meningkatkan sumber daya yang ada, untuk lebih terfokus kepada 10 jenis kondisi kegiatan yang menjadi Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.



3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.



Kerangka Pengukuran Kinerja 2022

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| Persentase | Predikat | Kode Warna |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| < 100% | Tidak Tercapai | Red |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target | Green |
| > 100% | Melebihi Target | Blue |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2022**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|----|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Sangat Baik | > 90 | Dark Blue |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 | Green |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 | Orange |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 | Yellow |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 | Red |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2018 – 2023, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2022. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2022, dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Nomor : 900/Kep.28 - Kec. Kc/XII/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, telah ditetapkan

sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Nomor : 900/Kep.28 - Kec. Kc/XII/2021 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.10

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2022**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
|----|---|---|--------|-----------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong | Persentase Siskamling RW aktif | 96,47 | 96,47 | 100,00 |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | 75,00 | 75,73 | 100,97 |
| | | Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menunjang RPJMD yang terrealisasi | 591 | 591 | 100,00 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | 84,25 | 85,18 | 101,10 |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong | Persentase Kelurahan Unggul | 83,33 | 83,33 | 100,00 |

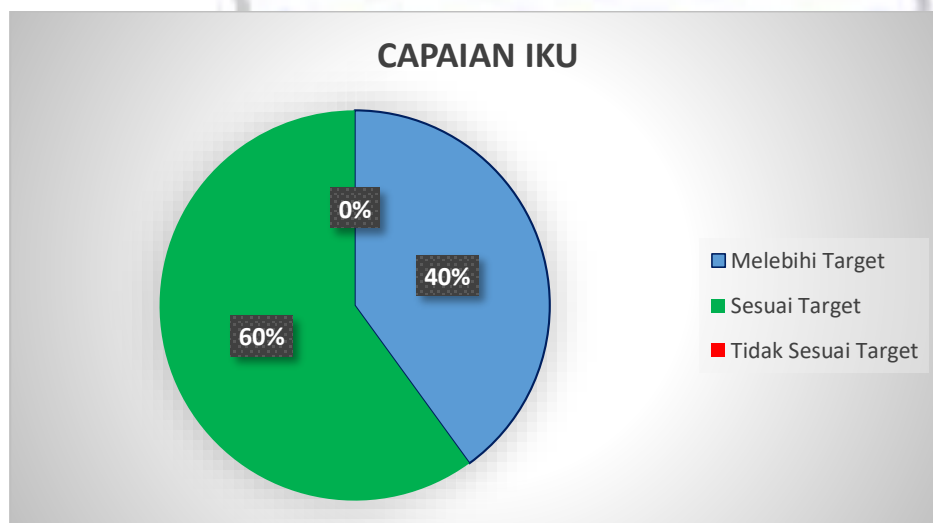
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dengan capaian kinerja 100,97 % dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dengan capaian kinerja 101,10 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100,00 % ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif, Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Menunjang RPJMD yang terealisasi, dan indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul dengan capaian kinerja 100,00 %.

Diagram 2.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2022**



Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dengan capaian kinerja 100,97 % dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dengan capaian kinerja 101,10 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif, Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Menunjang

RPJMD yang terealisasi dan Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 100,00 %.

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11

**Capaian Indikator Kinerja Strategis
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2022**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
|----|---|---|--------|-----------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong | Persentase Siskamling RW aktif | 96,47 | 96,47 | 100,00 |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | 75,00 | 75,73 | 100,97 |
| | | Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menunjang RPJMD yang terrealisasi | 591 | 591 | 100,00 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | 84,25 | 85,10 | 101,10 |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong | Persentase Kelurahan Unggul | 83,33 | 83,33 | 100,00 |

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 2.12

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN |
|----|---------------------------|---------|
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 50 % |
| 2 | Sesuai Target | 50 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 % |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.13

Pencapaian target Misi

| No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | |
|----|---------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | | | Melampaui target | | Sesuai Target | | Belum Mencapai Target | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Misi 1 | 3 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Misi 2 | 2 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Misi 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Misi 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Misi 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Jumlah | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 |

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

| No | Kategori | Jumlah Indikator | Persentase |
|-----------|---------------------------|------------------|------------|
| A. | Misi 1 | 3 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 1 | 0.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 2 | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 | 0.00 % |
| B. | Misi 2 | 2 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 1 | 0.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 1 | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 | 0.00 % |
| C. | Misi 3 | 0 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 0 | 0.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 0 | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 | 0.00 % |
| D. | Misi 4 | 0 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 0 | 0.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 0 | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 | 0.00 % |
| E. | Misi 5 | 0 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 0 | 0.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 0 | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 | 0.00 % |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di



masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2018 - 2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

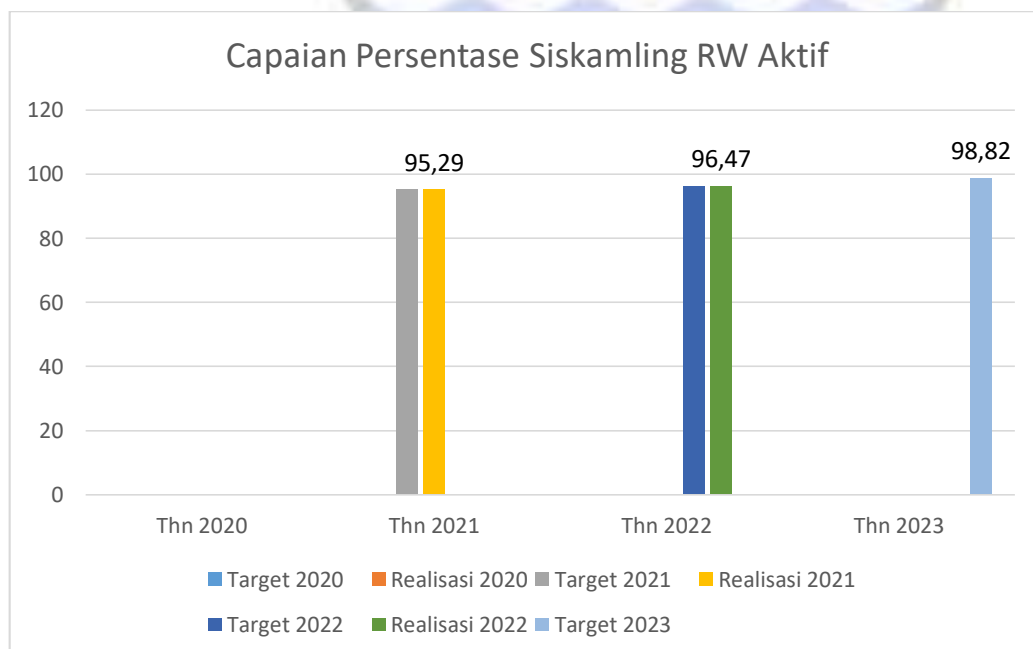
Tabel 2.15

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Tahun 2022 | | % |
|----|--------------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase Siskamling RW Aktif | % | 95,29 | 95,29 | 100,00 | 96,47 | 96,47 | 100,00 |

Grafik 2.7

Capaian Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan 2022



Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator "**Persentase Siskamling RW Aktif**" adalah sebesar 96,47 % dari target sebesar 96,47 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tabel 2.16

Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | s.d. Tahun 2022 | | % | Tahun 2023 (akhir Renstra) | |
|----|--------------------------------|--------|-----------------|-----------|--------|-------------------------------|-------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | % |
| 1 | Persentase Siskamling RW Aktif | % | 96,47 | 96,47 | 100,00 | 98,82 | 97,62 |

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Siskamling RW Aktif" sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 100,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2023 maka capaian kerjanya mencapai 97,62 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran koordinasi ketentraman dan ketertiban yang mendukung tercapainya indikator Persentase Siskamling RW Aktif lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan

dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-1 Kota Bandung yaitu “*Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing*” adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif adalah persentase jumlah RW yang memiliki (kriteria) Siskamling Aktif dibagi dengan jumlah seluruh RW di Kecamatan.

3. Kinerja nyata dengan Rencana :

Hasil kinerja nyata indikator Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong Tahun 2022 adalah sebesar 96,47 % dari target sebesar 96,47 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil pencapaian Persentase Siskamling RW Aktif, pada Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :

| Wilayah | Jumlah RW | Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW aktif | % | Keterangan |
|--------------------|-----------|--|-------|---|
| Kelurahan Sukapura | 15 | 15 | 17,65 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------|--|
| Kelurahan Kebon Jayanti | 14 | 11 | 12,94 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif sebesar 78,57% |
| Kelurahan Babakan Surabaya | 15 | 15 | 17,65 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif |
| Kelurahan Cicaheum | 12 | 12 | 14,12 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif |
| Kelurahan Babakansari | 18 | 18 | 21,17 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif |
| Kelurahan Kebon Kangkung | 11 | 11 | 12,94 | Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif |
| Jumlah | 85 | 82 | 96,47 | |

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong tahun 2022 sebesar 96,47 % atau 82 RW yang telah memenuhi kriteria siskamling RW aktif dari 85 RW yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong tahun 2022 sebesar 96,47 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2021 sebesar 95,29 % ada peningkatan sebesar 1,18 %, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Kiaracondong dalam melaksanakan siskamling aktif dalam mewujudkan kamtibmas di tingkat wilayah cukup baik demi salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 1 Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 96,47 % bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangla menengah (akhir Renstra) tahun 2023 sebesar 98,82 % baru mencapai 97,62 %. Untuk mencapai target kinerja tersebut maka untuk meningkatkan kinerja

yang optimal diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Perbandingan Persentase Siskamling RW Aktif Tahun 2022 dengan instansi lainnya :

| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | ANDIR | 61,11 | 61,72 | 101,00 |
| 2 | ANTAPANI | 78,00 | 100,00 | 128,21 |
| 3 | ARCAMANIK | 83,33 | 85,19 | 102,23 |
| 4 | ASTANAANYAR | 63,00 | 65,96 | 104,70 |
| 5 | BABAKAN CIPARAY | 52,60 | 52,60 | 100,00 |
| 6 | BATUNUNGGAL | 79,52 | 79,52 | 100,00 |
| 7 | BANDUNG KIDUL | 65,00 | 86,00 | 132,31 |
| 8 | BANDUNG KULON | 75,00 | 65,31 | 87,08 |
| 9 | BANDUNG WETAN | 80,56 | 80,56 | 100,00 |
| 10 | BUAH BATU | 63,64 | 63,64 | 100,00 |
| 11 | BOJONGLOA KALER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | BOJONGLOA KIDUL | 65,91 | 71,11 | 107,89 |
| 13 | CIBEUNYING KALER | 54,35 | 63,04 | 115,99 |
| 14 | CIBEUNYING KIDUL | 49,43 | 50,00 | 101,15 |
| 15 | CIBIRU | 58,49 | 58,49 | 100,00 |
| 16 | CICENDO | 71,43 | 75,00 | 105,00 |
| 17 | CIDADAP | 41,21 | 51,72 | 125,50 |
| 18 | CINAMBO | 91,30 | 91,30 | 100,00 |
| 19 | COBLONG | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | GEDE BAGE | 87,00 | 87,08 | 100,09 |
| 21 | KIARACONDONG | 96,47 | 96,47 | 100,00 |
| 22 | LENGKONG | 59,87 | 81,54 | 136,20 |
| 23 | RANCASARI | 75,00 | 84,62 | 112,83 |
| 24 | REGOL | 85,00 | 85,00 | 100,00 |
| 25 | MANDALAJATI | 62,00 | 62,00 | 100,00 |
| 26 | SUKASARI | 80,00 | 85,00 | 106,25 |
| 27 | SUKAJADI | 73,47 | 73,47 | 100,00 |
| 28 | SUMUR BANDUNG | 56,76 | 56,76 | 100,00 |
| 29 | UJUNG BERUNG | 94,92 | 94,92 | 100,00 |
| 30 | PANYILEUKAN | 56,76 | 62,16 | 109,51 |

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 1 Kecamatan Kiaracondong yaitu Persentase Siskamling RW Aktif pada tahun 2022 sebesar 96,47 % dari target 96,47 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan



terdekat yaitu Kecamatan Babakan Ciparay, Batununggal, Bandung Wetan, Buahbatu, Cibiru, Cinambo, Regol, Mandalajati, Sukajadi, Sumur Bandung dan Ujung Berung dengan capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, maka Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 1 yaitu terdiri atas program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar 100 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1 yaitu Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 96,47 %. Realisasi (*inputs*) 96,47 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{96,47}{96,47} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan/sub kegiatan dalam program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

| NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | OUTPUTS | INPUTS | CAPAIAN (%) |
|---|---|------------------------|------------------------|--|
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Siskamling RW Aktif | 96,47 % | 96,47 % | $= \frac{96,47\%}{96,47\%} \times 100\% = 100\%$ |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Siskamling RW yang terbina | 82 Siskamling RW | 82 Siskamling RW | $= \frac{82 \text{ RW}}{82 \text{ RW}} \times 100\% = 100\%$ |
| Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah pembinaan siskamling RW | 4 kegiatan | 4 kegiatan | $= \frac{4 \text{ keg}}{4 \text{ keg}} \times 100\% = 100\%$ |

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.1.652.882.420,00 atau 94,92 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.741.359.250,00.

Faktor pendukung Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan



Kepala Daerah belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kecamatan dan Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

2. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum optimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.

Solusi Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong :

Untuk meningkatkan sasaran 1 dengan capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Siskamling RW Aktif dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang terkait.
2. Menginstruksikan kepada para PPTK Kecamatan dan Kelurahan agar melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan lembaga masyarakat sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai tepat waktu.

Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

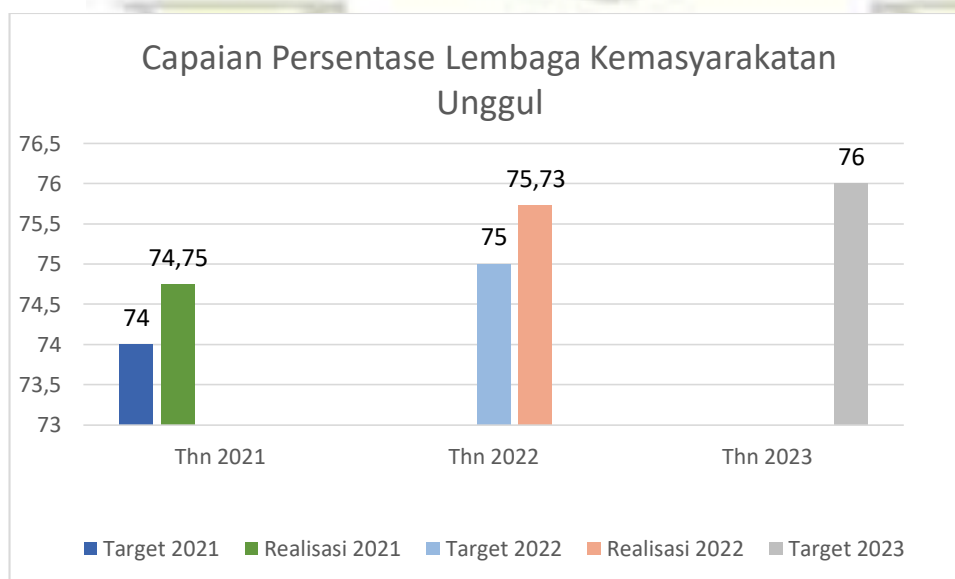
Tabel 2.17

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Tahun 2022 | | % |
|----|---|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | % | 74 | 74,75 | 101,01 | 75 | 75,73 | 100,97 |
| 2 | Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menunjang RPJMD yang terrealisasi | kegiatan | 315 | 311 | 98,73 | 591 | 591 | 100,00 |

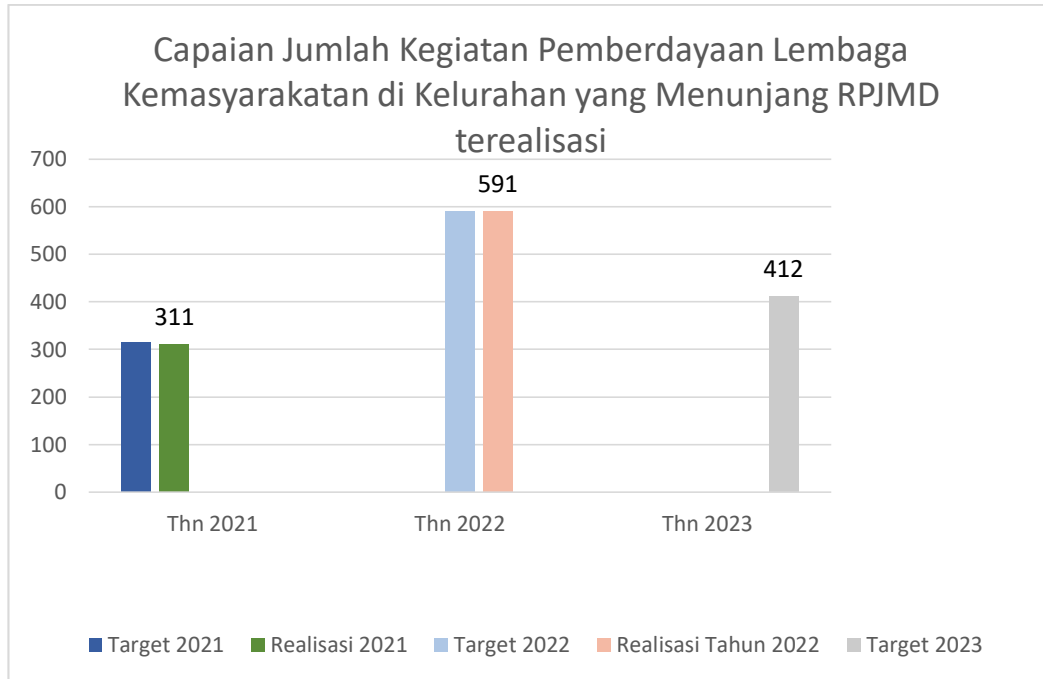
Grafik 2.8

Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan 2022



Grafik 2.9

Capaian Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Menunjang RPJMD terealisasi Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan Tahun 2022



Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul**" adalah sebesar 75,73 % dari target sebesar 75,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,97 %, capaian kinerja ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan. Meskipun telah melampaui target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Capaian kinerja nyata indikator Jumlah "**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Menunjang RPJMD terealisasi**" tahun 2022 adalah sebesar 591 kegiatan dari target sebesar 591 kegiatan yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya

adalah 100,00%. Meskipun capaian kinerja telah sesuai/mencapai target yang diperjanjikan, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tabel 2.18

Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | s.d. Tahun 2022 | | % | Tahun 2023 (akhir Renstra) | |
|----|---|----------|-----------------|-----------|--------|-------------------------------|-------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | % |
| 1 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | % | 75,00 | 75,73 | 100,97 | 76,00 | 99,64 |
| 2 | Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menunjang RPJMD yang terrealisasi | kegiatan | 906 | 902 | 99,56 | 1.048 | 86,07 |

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul" sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 100,97 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2023 maka capaian kinerjanya mencapai 99,64 %. Capaian kinerja indikator "Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menunjang RPJMD yang terrealisasi" sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 99,56 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2023 maka capaian kinerjanya mencapai 86,07 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran pemberdayaan mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-1 Kota Bandung yaitu “*Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing*” adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Persentase jumlah LKK yang memenuhi kriteria LKK Unggul dibagi dengan jumlah seluruh LKK Kelurahan se-Kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.

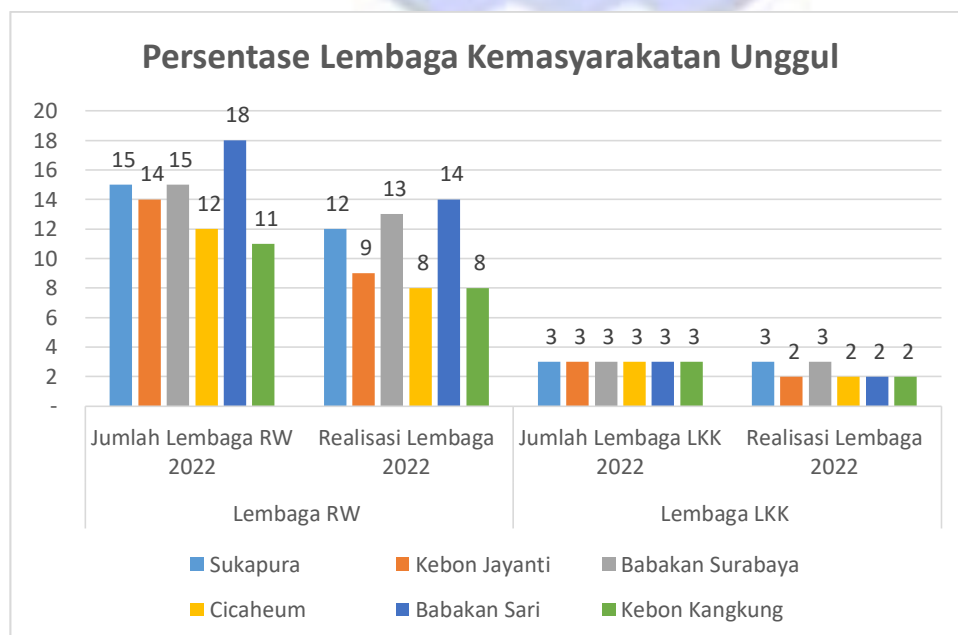
3. Kinerja nyata dengan Rencana Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :

| Wilayah | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul | | Pencapaian | |
|------------------|---|-----------|---|-----------|------------|--------------|
| | RW | LKK | RW | LKK | Lembaga | % |
| Kelurahan | | | | | | |
| Sukapura | 15 | 3 | 12 | 3 | 15 | 14,56 |
| Kebon Jayanti | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 10,68 |
| Babakan Surabaya | 15 | 3 | 13 | 3 | 16 | 15,53 |
| Cicaheum | 12 | 3 | 8 | 2 | 10 | 9,71 |
| Babakansari | 18 | 3 | 14 | 2 | 16 | 15,53 |
| Kebon Kangkung | 11 | 3 | 8 | 2 | 10 | 9,71 |
| Jumlah | 85 | 18 | 64 | 14 | 78 | 75,73 |
| | 103 | | | | | |

Grafik 2.9

Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2022 Kecamatan Kiaracondong





Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2022 sebesar 75,73 % atau 100,97 % dari target 75,00 % yang diperjanjikan. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul sebesar 75,73 % , merupakan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% dengan rincian kriteria sebagai berikut :

- Lembaga RW Unggul = 62,14 %
- Lembaga LKK Unggul = 13,59 %
- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Unggul = 75,73 %

Pada Tingkat Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kinerjanya ada pada RW Unggul yang mempunyai persentase paling rendah yaitu sebesar 75,29 % atau 64 lembaga yang tercapai unggul dari 85 lembaga yang ada, sedangkan LKK Unggul pencapaian kinerjanya mencapai 77,78 % atau 14 lembaga yang tercapai unggul dari 18 lembaga yang ada. Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu lembaga LKK Unggul. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada lembaga RW Unggul.

Yang mempengaruhi nilai terendah adalah sebagai berikut :

- Masih banyak pengurus RW dan LKK yang belum mengetahui dan memahami kriteria Lembaga RW Unggul dan lembaga LKK Unggul.
- Adanya refofusing anggaran kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang berdampak dukungan program kerja Wali Kota dan RPJMD menurun.

Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menunjang RPJMD yang terrealisasi sejumlah 591 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- Kel. Sukapura = 100 kegiatan
- Kel. Kebon Jayanti = 108 kegiatan
- Kel. Babakan Surabaya = 65 kegiatan
- Kel. Cicaheum = 96 kegiatan
- Kel. Babakansari = 142 kegiatan

- Kel. Kebon Kangkung = 80 kegiatan

Capaian indikator jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menunjang RPJMD yang terealisasi pada tahun 2022 sejumlah 591 kegiatan telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja atau capaiannya 100,00 %, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap Kelurahan telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang menunjang RPJMD terealisasi.

Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menunjang RPJMD terealisasi yang tertinggi ada di kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi sebanyak 417 kegiatan, sedangkan yang terendah ada di kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi sebanyak 174 kegiatan.

Yang mempengaruhi nilai terendah diantaranya masih ada pengurus RW dan LKK belum memahami kriteria Lembaga Kemasyarakatan Unggul sehingga perencanaan kegiatan belum sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan lembaga kemasyarakatan yang di Kelurahan.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 101,31 % bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang capaian kinerjanya sebesar 74,75 %. Hal-hal yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja tersebut diantaranya anggaran kegiatan pemberdayaan telah mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 75,73 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja

akhir Renstra tahun 2023 sebesar 76,00 % capaian kinerjanya baru mencapai 99,64 %. Hasil capaian kinerja jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menunjang RPJMD yang terealisasi sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 902 kegiatan atau 86,07% bila dibandingkan dengan capaian kinerja akhir Renstra tahun 2023 sejumlah 1.048 kegiatan. Untuk mencapai kinerja tersebut agar ditingkatkan kembali kegiatan pemberdayaan yang mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD sebagai parameter dan indikator kinerja serta fokus kepada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah.

Grafik 2.10

Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2022 terhadap Renstra 2023 Kecamatan Kiaracondong



6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2022 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut :



| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|----|---------------------|---|--------------|---------------|
| | | PERSENTASE LEMABAGA KEMASYARAKATAN UNGGUL | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | ANDIR | 59,15 | 91,37 | 154,37 |
| 2 | ANTAPANI | 81,00 | 81,90 | 101,11 |
| 3 | ARCAMANIK | 75,69 | 86,36 | 114,10 |
| 4 | ASTANAANYAR | 75,00 | 88,66 | 118,21 |
| 5 | BABAKAN CIPARAY | 82,00 | 88,76 | 108,24 |
| 6 | BATUNUNGGAL | 82,38 | 83,33 | 101,15 |
| 7 | BANDUNG KIDUL | 77,00 | 79,00 | 102,60 |
| 8 | BANDUNG KULON | 84,50 | 97,46 | 115,33 |
| 9 | BANDUNG WETAN | 84,44 | 84,44 | 100,00 |
| 10 | BUAH BATU | 74,62 | 74,62 | 100,00 |
| 11 | BOJONGLOA KALER | 80,00 | 83,42 | 104,27 |
| 12 | BOJONGLOA KIDUL | 78,00 | 85,32 | 109,38 |
| 13 | CIBEUNYING KALER | 68,97 | 79,31 | 114,99 |
| 14 | CIBEUNYING KIDUL | 60,84 | 114,52 | 188,23 |
| 15 | CIBIRU | 82,00 | 91,00 | 110,98 |
| 16 | CICENDO | 81,65 | 81,65 | 100,00 |
| 17 | CIDADAP | 83,33 | 86,84 | 104,21 |
| 18 | CINAMBO | 86,21 | 86,21 | 100,00 |
| 19 | COBLONG | 93,71 | 93,71 | 100,00 |
| 20 | GEDE BAGE | 70,00 | 81,00 | 115,61 |
| 21 | KIARACONDONG | 75,00 | 75,73 | 100,97 |
| 22 | LENGKONG | 69,75 | 96,51 | 138,37 |
| 23 | RANCASARI | 78,00 | 90,60 | 116,15 |
| 24 | REGOL | 67,90 | 67,90 | 100,00 |
| 25 | MANDALAJATI | 79,00 | 79,00 | 100,00 |
| 26 | SUKASARI | 82,00 | 84,64 | 103,22 |
| 27 | SUKAJADI | 79,00 | 79,69 | 100,87 |
| 28 | SUMUR BANDUNG | 77,50 | 83,33 | 107,52 |
| 29 | UJUNG BERUNG | 70,00 | 81,80 | 115,83 |
| 30 | PANYILEUKAN | 70,00 | 71,42 | 102,03 |

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 2 Kecamatan Kiaracondong Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada tahun 2022 sebesar 75,73 % dari target 75,00 % dengan capaian kinerja sebesar 100,97 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Bandung Wetan, Buahbatu, Cicendo, Cinambo, Coblong, Regol, Mandalajati, dan Sukajadi dengan capaian kinerjanya sebesar 100,97%, maka Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 2 yaitu terdiri atas program Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan pada tahun 2022 sebesar 100,97 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 2 yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong sudah berjalan dengan baik, dan jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menunjang RPJMD terealisasi pada tahun 2022 mencapai 100,00 %, dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 75,00 %. Realisasi (*inputs*) 75,73 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{75,73}{75,00} \times 100 \% = 100,97 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 75,00 % sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Realisasi (*inputs*) 75,73 % sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{75,73}{75,00} \times 100 \% = 100,97 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong Tahun Anggaran 2022.



| NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN | OUTPUTS | INPUTS | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | 75,00 % | 75,73 % | $\frac{75,73}{75,00} \times 100 \%$ = 100,97 % |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dan RW terbina | 77 lembaga dan RW | 78 lembaga dan RW | $\frac{75,73}{75,00} \times 100 \%$ = 100,97 % |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi | Jumlah lembaga kemasyarakatan RW se Kecamatan Kiaracondong = 85 lembaga | Kelurahan Sukapura = 12 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{12}{103} \times 100 \%$ = 11,65 % |
| | | | Kelurahan Kebon Jayanti = 9 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{9}{103} \times 100 \%$ = 8,74 % |
| | | | Kelurahan Babakan Surabaya = 13 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{13}{103} \times 100 \%$ = 12,62 % |
| | | | Kelurahan Cicaheum = 8 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{8}{103} \times 100 \%$ = 7,77 % |
| | | | Kelurahan Babakansari = 14 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{14}{103} \times 100 \%$ = 13,59 % |
| | | | Kelurahan Kebon Kangkung = 8 lembaga RW unggul terealisasi | $\frac{8}{103} \times 100 \%$ = 7,77 % |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi | Jumlah lembaga kemasyarakatan LKK se Kecamatan | Kelurahan Sukapura = 3 lembaga LKK | $\frac{3}{103} \times 100 \%$ = 2,91 % |





| | | | | |
|--|--|------------------------------|---|---|
| | | Kiaracondong = 18 lembaga | unggul terrealisasi | |
| | | | Kelurahan Kebon Jayanti = 2 lembaga LKK unggul terrealisasi | $\frac{2}{103} \times 100 \% = 1,94 \%$ |
| | | | Kelurahan Babakan Surabaya = 3 lembaga LKK unggul terrealisasi | $\frac{3}{103} \times 100 \% = 2,91 \%$ |
| | | | Kelurahan Cicaheum = 2 lembaga LKK unggul terrealisasi | $\frac{2}{103} \times 100 \% = 1,94 \%$ |
| | | | Kelurahan Babakansari = 2 lembaga LKK unggul terrealisasi | $\frac{2}{103} \times 100 \% = 1,94 \%$ |
| | | | Kelurahan Kebon Kangkung = 2 lembaga LKK unggul terrealisasi | $\frac{2}{103} \times 100 \% = 1,94 \%$ |

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 96 unit posyandu purnama dan UKM terbina. Realisasi (*inputs*) 96 unit posyandu purnama dan UKM terbina dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{96}{96} \times 100 \% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong Tahun Anggaran 2022.



| NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN | OUTPUTS | INPUTS | CAPAIAN (%) |
|--|---|---------|---|---|
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan | 75,00 % | 75,73 % | $\frac{75,73}{75,00} \times 100 \% = 100,97 \%$ |
| Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina | 96 unit | 96 unit | $\frac{96}{96} \times 100 \% = 100 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah posyandu purnama | 93 unit | Kelurahan Sukapura = 20 unit posyandu purnama | $\frac{20}{96} \times 100 \% = 20,83 \%$ |
| | | | Kelurahan Kebon Jayanti = 14 unit posyandu purnama | $\frac{14}{96} \times 100 \% = 14,58 \%$ |
| | | | Kelurahan Babakan Surabaya = 20 unit posyandu purnama | $\frac{20}{96} \times 100 \% = 20,83 \%$ |
| | | | Kelurahan Cicaheum = 14 unit posyandu purnama | $\frac{14}{96} \times 100 \% = 14,58 \%$ |
| | | | Kelurahan Babakansari = 15 unit posyandu purnama | $\frac{15}{96} \times 100 \% = 15,63 \%$ |
| | | | Kelurahan Kebon Kangkung = 10 unit posyandu purnama | $\frac{10}{96} \times 100 \% = 10,43 \%$ |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah UKM yang terbina | 3 unit | Kelurahan Sukapura = 1 unit UKM terbina | $\frac{1}{96} \times 100 \% = 1,04 \%$ |



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | Kelurahan Babakan Surabaya = 1 unit UKM terbina | $\frac{1}{96} \times 100 \% = 1,04 \%$ |
| | | | Kelurahan Kebon Kangkung = 1 unit UKM terbina | $\frac{1}{96} \times 100 \% = 1,04 \%$ |

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 10.348.699.500,00 atau 94,40 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.962.776.251,00.

Faktor pendukung Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.
4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong :

1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Solusi Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong :

Untuk meningkatkan sasaran 2 dengan capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan yang terkait di Kelurahan untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPJMD dan janji Kepala Daerah.
2. Menyusun rencana kerja yang baik terkait dengan instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.

Sasaran 3

Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.19

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Tahun 2022 | | % |
|----|---|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | Nilai | 83,00 | 86,80 | 104,58 | 84,25 | 85,18 | 101,10 |

Grafik 2.11

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan Tahun 2022



Sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong**" adalah sebesar 85,18

dari target sebesar 84,25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,10 %, capaian kinerja ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan. Meskipun telah melampaui target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tabel 2.20
Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong
terhadap target Renstra 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | % | Tahun 2023 | |
|----|---|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | % |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | Nilai | 84,25 | 85,18 | 101,10 | 85,25 | 99,92 |

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong" tahun ini adalah sebesar 101,10 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2023 maka capaian kinerjanya baru mencapai 99,92 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mendukung tercapainya indikator nilai indeks kepuasan masyarakat lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus

pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-2 Kota Bandung yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih*” adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong adalah rata-rata nilai IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. Kinerja nyata dengan Rencana :

Hasil kinerja nyata indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2022 adalah sebesar 85,18 dari target sebesar 84,25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 0,93 point yaitu 101,10 % atau melebihi/melampaui target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

Nilai Unsur-unsur Pelayanan Gabungan sebagai berikut :

| No. | UNSUR PELAYANAN | NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR) |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | Persyaratan (U1) | 3,17 |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2) | 3,36 |
| 3 | Waktu Penyelesaian (U3) | 3,31 |
| 4 | Biaya/Tarif (U4) | 3,95 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) | 3,26 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana (U6) | 3,26 |
| 7 | Perilaku Pelaksana (U7) | 3,31 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8) | 3,80 |
| 9 | Sarana dan Prasarana (U9) | 3,24 |
| 10 | Nilai Unsur Tertinggi | 3,95 |
| 11 | Nilai Unsur Terendah | 3,17 |

Sumber : Kecamatan Kiaracondong jumlah Responden sebanyak : 170 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = \mathbf{3.41}$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKM setelah dikonversi = **85,18**
- Mutu Pelayanan = **B**
- Kinerja unit pelayanan adalah **Baik**

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/ Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada persyaratan (U1), dan sarana dan prasarana (U9) karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan, sedangkan posisi nilai tertinggi yang harus tetap dipertahankan adalah Biaya/Tarif (U4).

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Ongkos dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak lagi dikenakan atau dipungut biaya pengurusan sehingga masyarakat dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan dari segi biaya.
2. Sudah menurunnya pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah sebagai berikut :

1. Masyarakat berpendapat bahwa persyaratan pada jenis layanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk belum mendapatkan informasi secara lengkap baik secara teknis maupun administrative.
2. Masyarakat masih berpendapat bahwa sarana dan prasarana pelayanan belum dirasakan secara maksimal seperti kursi di ruang tunggu sangat terbatas.

Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan :

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap layanan yang ada di kewilayahan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang ada agar lebih meningkat kinerjanya.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada guna meningkatkan hasil kinerja pelayanan.



Upaya untuk meningkatkan unsur pelayanan :

1. Kecamatan serta Kelurahan yang ada di lingkup Kecamatan Kiaracondong berupaya untuk menyampaikan dan memberikan informasi yang lengkap baik secara teknis maupun administrative kepada masyarakat.
2. Kecamatan dan Kelurahan agar berupaya untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
3. Kecamatan dan Kelurahan agar memfasilitasi kenyamanan ruang tunggu pelayanan secara optimal.

Meskipun telah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya meningkatkan kompetensi petugas layanan sebagai garda terdepan terhadap produk layanan yang diberikan Kecamatan dan Kelurahan sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada Tahun tahun 2022 adalah sebesar 85,18 bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2021 sebesar 86,80 maka mengalami penurunan sebesar 1,62 point atau capaian mengalami penurunan sebesar 1,87 % terhadap realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2021. Capaian kinerja nyata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Penurunan capaian kinerja nyata pada indikator kinerja utama tahun sebelumnya dapat dilihat dari beberapa unsur (NRR) yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain :

- Unsur (U1) turun 0,29 point
- Unsur (U4) turun 0,05 point
- Unsur (U5) turun 0,23 point
- Unsur (U6) turun 0,07 point, dan



- Unsur (U9) turun 0,04 point.

Disamping itu terdapat capaian kinerja nyata indikator kinerja utama dengan beberapa indikator unsur pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang naik. Hal dapat dilihat dari beberapa unsur (NRR) yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain :

- Unsur (U2) naik 0,07 point
- Unsur (U3) naik 0,01 point, dan
- Unsur (U8) naik 0,03 point.

Terhadap nilai unsur pelayanan yang rendah perlu ditindaklanjuti dan menjadi skala prioritas perbaikan, dengan melakukan inovasi layanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2022 adalah sebesar 85,18 bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangla menengah (akhir Renstra) tahun 2023 sebesar 85,25 telah mencapai 99,92 %. Untuk mencapai target kinerja tersebut maka perlu dilakukan perbaikan unsur layanan secara terus menerus dan konsisten terhadap pelayanan yang harus diberikan Kecamatan dan Kelurahan kepada masyarakat dan serta perlu ditingkatkan secara maksimal sehingga capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2022 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut :



| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|----|------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | NILAI IKM KECAMATAN | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | ANDIR | 81,80 | 84,49 | 103,29 |
| 2 | ANTAPANI | 86,50 | 88,78 | 102,64 |
| 3 | ARCAMANIK | 84,00 | 84,66 | 100,79 |
| 4 | ASTANAANYAR | 84,00 | 85,85 | 102,20 |
| 5 | BABAKAN CIPARAY | 81,80 | 84,97 | 103,88 |
| 6 | BATUNUNGGAL | 85,00 | 86,14 | 101,34 |
| 7 | BANDUNG KIDUL | 86,00 | 89,17 | 103,69 |
| 8 | BANDUNG KULON | 84,50 | 85,24 | 100,88 |
| 9 | BANDUNG WETAN | 83,25 | 84,60 | 101,62 |
| 10 | BUAH BATU | 84,00 | 85,00 | 101,19 |
| 11 | BOJONGLOA KALER | 84,40 | 85,04 | 100,76 |
| 12 | BOJONGLOA KIDUL | 85,00 | 85,26 | 100,31 |
| 13 | CIBEUNYING KALER | 86,50 | 87,72 | 101,41 |
| 14 | CIBEUNYING KIDUL | 84,78 | 85,01 | 100,27 |
| 15 | CIBIRU | 85,00 | 85,48 | 100,56 |
| 16 | CICENDO | 85,86 | 85,96 | 100,12 |
| 17 | CIDADAP | 82,00 | 85,03 | 103,70 |
| 18 | CINAMBO | 83,91 | 85,72 | 102,16 |
| 19 | COBLONG | 84,97 | 93,21 | 109,70 |
| 20 | GEDE BAGE | 84,50 | 91,21 | 107,94 |
| 21 | KIARACONDONG | 84,25 | 85,18 | 101,10 |
| 22 | LENGKONG | 85,35 | 85,83 | 100,56 |
| 23 | RANCASARI | 85,50 | 88,43 | 103,43 |
| 24 | REGOL | 83,80 | 85,43 | 101,95 |
| 25 | MANDALAJATI | 84,00 | 85,45 | 101,73 |
| 26 | SUKASARI | 84,00 | 86,37 | 102,82 |
| 27 | SUKAJADI | 84,00 | 84,17 | 100,20 |
| 28 | SUMUR BANDUNG | 84,00 | 85,58 | 101,88 |
| 29 | UJUNG BERUNG | 84,00 | 85,73 | 102,06 |
| 30 | PANYILEUKAN | 85,20 | 85,62 | 100,49 |

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 3 Kecamatan Kiaracondong yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2022 sebesar 85,18 dari target 84,25 dengan capaian kinerja sebesar 101,10 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Arcamanik, Bandung Kulon, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Cibeunying Kidul, Cibiru, Cicendo, Lengkong, Sukajadi dan Panyileukan dengan capaian kinerjanya sebesar 101,10 %, maka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 3 yaitu terdiri atas program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 101,10 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 84,25. Realisasi (*inputs*) 85,18 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{85,18}{84,25} \times 100\% = 101,10\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

| NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN | OUTPUTS | INPUTS | CAPAIAN (%) |
|---|---|---------|---------|---|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 90,00 % | 93,10 % | $\frac{93,10}{90,00} \times 100\% = 103,44\%$ |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | 90,00 % | 99,77 % | $\frac{99,77}{90,00} \times 100\% = 110,85\%$ |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 lap | 1 lap | $\frac{1 \text{ lap}}{1 \text{ lap}} \times 100\% = 100,00\%$ |



| | | | | |
|---|---|---------|---------|---|
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 90,00 % | 94,35 % | $\frac{94,35}{90,00} \times 100 \% = 104,83 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 12 lap | 12 lap | $\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 lap | 1 lap | $\frac{1 \text{ lap}}{1 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 1 lap | 1 lap | $\frac{1 \text{ lap}}{1 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 90,00 % | 77,73 % | $\frac{77,73}{90,00} \times 100 \% = 86,37 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |





| | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|---|
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai prosedur | 90,00 % | 81,26 % | $\frac{81,26}{90,00} \times 100 \% = 90,29 \%$ |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90,00 % | 92,12 % | $\frac{92,12}{90,00} \times 100 \% = 102,35 \%$ |
| Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terrealisasi | 7 unit | 7 unit | $\frac{7 \text{ unit}}{7 \text{ unit}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah unit mebelair terrealisasi | 105 unit | 105 unit | $\frac{105 \text{ unit}}{105 \text{ unit}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terrealisasi | 66 unit | 64 unit | $\frac{64 \text{ unit}}{66 \text{ unit}} \times 100 \% = 96,97 \%$ |
| Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya terrealisasi | 1 unit | 1 unit | $\frac{1 \text{ unit}}{1 \text{ unit}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 90,00 % | 94,81 % | $\frac{94,81}{90,00} \times 100 \% = 105,34 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 jasa bulanan | 12 jasa bulanan | $\frac{12 \text{ jb}}{12 \text{ jb}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |





| | | | | |
|---|--|---------|---------|---|
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12 lap | 12 lap | $\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 90,00 % | 87,88 % | $\frac{87,88}{90,00} \times 100 \% = 97,64 \%$ |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang terpelihara | 34 unit | 34 unit | $\frac{34 \text{ unit}}{34 \text{ unit}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terrealisasi | 46 unit | 36 unit | $\frac{36 \text{ unit}}{46 \text{ unit}} \times 100 \% = 78,26 \%$ |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 6 unit | 6 unit | $\frac{6 \text{ unit}}{6 \text{ unit}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 13.718.743.573,- atau 93,10 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.736.213.777,-.

Dengan nilai sasaran target yang sudah kami tentukan ada beberapa kendala yang kami alami untuk mendapatkan nilai yang objektif di antaranya :

1. Tidak semua warga masyarakat penerima pelayanan, memahami pentingnya pelaksanaan IKM, sehingga tidak jarang

masyarakat penerima pelayanan tidak bersedia untuk mengisi kuisisioner yang kami berikan.

2. Masyarakat yang mengisi kuisisioner yang kami berikan sering kali tidak mengisinya dengan objektif sesuai dengan apa yang dirasakan dari pelayanan yang diterima.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan maka perlu menindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana aksi serta anggaran untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan.
2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.

Faktor pendukung Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kecamatan

dan Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

2. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.

Solusi Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong :

Untuk meningkatkan sasaran 3 dengan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang terkait.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.

Sasaran 4

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

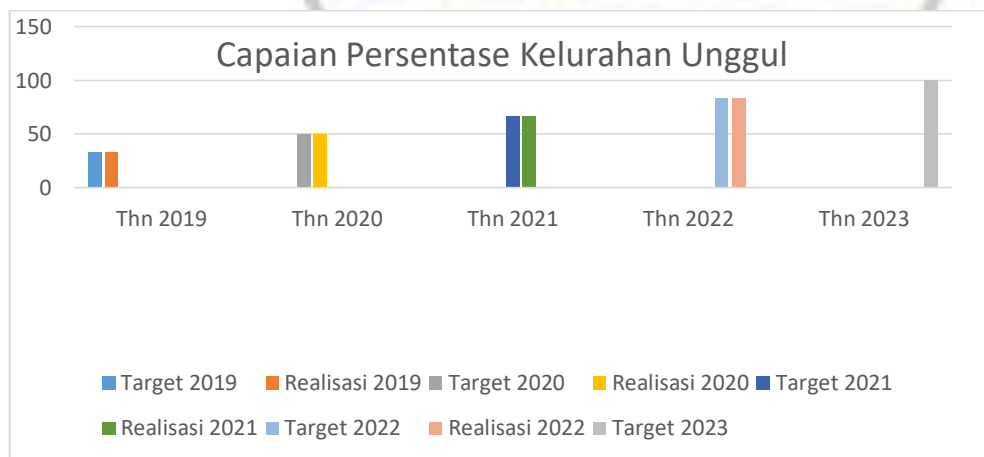
Tabel 2.21

Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong

| No | Indikator Kinerja | Sat | Tahun 2021 | | % | Tahun 2022 | | % |
|----|-----------------------------|-----|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase Kelurahan Unggul | % | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 83,33 | 83,33 | 100,00 |

Grafik 2.12

Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan 2022



Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator **Persentase Kelurahan Unggul** adalah sebesar 83,33 % dari target sebesar 83,33 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,00 %, capaian kinerja ini sesuai target yang

diperjanjikan. Meskipun telah sesuai dengan target yang dicapai, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tabel 2.22

Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Kiaracondong
terhadap target Renstra 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | % | Tahun 2023 | |
|----|-----------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | % |
| 1 | Persentase Kelurahan Unggul | % | 83,33 | 83,33 | 100,00 | 100,00 | 83,33 |

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator *Persentase Kelurahan Unggul* tahun ini adalah sebesar 100,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong maka capaian kinerjanya mencapai 83,33 %.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-2 Kota Bandung yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih*” adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota

Bandung adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul adalah Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul diantaranya memenuhi atau melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi kegiatan diantaranya :

1. Pojok Baca / Taman Baca;
2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah;
3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan;
4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perKelurahan;
5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak);
6. Pembuatan Septic Tank Komunal;
7. Kegiatan KangPisman;
8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan;
9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah;
10. Laporan RT dan RW tepat waktu.

3. Kinerja nyata dengan Rencana

Realisasi capaian indikator kinerja **Persentase Kelurahan Unggul** tahun 2022 sebesar 83,33 % atau 100,00 % dari target 83,33 % yang diperjanjikan. Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2022 sebesar 83,33 %, merupakan persentase jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi jumlah Kelurahan dengan rincian kriteria sebagai berikut : Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sebanyak 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya, Kelurahan Kebon Kangkung, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Cicaheum dari 6 Kelurahan se-Kecamatan Kiaracondong, sementara 1 Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Kebon Jayanti belum memenuhi sebagai kriteria Kelurahan Unggul, sehingga pencapaian baru 83,33 %.

Kriteria Persentase Kelurahan Unggul sebagai berikut :



| No | Jenis Kondisi | Kelurahan Sukapura | Kelurahan Kebon Jayanti | Kelurahan Babakan Surabaya | Kelurahan Cicaheum | Kelurahan Babakan Sari | Kelurahan Kebon Kangkung |
|--|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Pojok Baca / Taman Baca | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| 2 | Gerakan menyemarakkan tempat ibadah | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana |
| 3 | Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| 4 | Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Tidak Terlaksana |
| 5 | Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak) | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana | Tidak Terlaksana |
| 6 | Septic Tank Komunal | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| 7 | Kegiatan KangPisman, memenuhi salah satu atau lebih | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| 8 | Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| 9 | Pembentukan Koperasi ditempat ibadah | Terlaksana | Tidak Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| 10 | Laporan RT dan RW tepat waktu | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| Jumlah jenis/ kondisi yang memenuhi/ melaksanakan | | 7 jenis kondisi | 4 jenis kondisi | 8 jenis kondisi | 7 jenis kondisi | 8 jenis kondisi | 7 jenis kondisi |
| Kriteria Kelurahan | | Kelurahan Unggul | Kelurahan Belum Unggul | Kelurahan Unggul | Kelurahan Unggul | Kelurahan Unggul | Kelurahan Unggul |

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul pada Tahun 2022 adalah sebesar 83,33 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2021 sebesar 66,67 % mengalami kenaikan sebesar 16,66 % terhadap realisasi tahun 2021 atau



capaian kerjanya meningkat sebesar 33,33 % terhadap capaian kinerja tahun 2021. Meskipun sudah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mempertahankan kondisi kegiatan yang menjadi parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang telah mencapai, sedangkan bagi Kelurahan yang belum unggul akan ditingkatkan terus kondisi kegiatannya sehingga menjadi Kelurahan Unggul.

5. Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan

Pencapaian hasil kinerja tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100,00 %, dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong sebesar 100,00 % maka capaian kerjanya baru mencapai 83,33 %. Untuk mencapai target kinerja akhir Renstra maka perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kondisi kegiatan yang menjadi kriteria atau parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang belum unggul.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Persentase Kelurahan Unggul tahun 2022 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, adalah sebagai berikut :

| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|----|------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| | | PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | ANDIR | 50,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2 | ANTAPANI | 75,00 | 100,00 | 133,33 |
| 3 | ARCAMANIK | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 4 | ASTANAANYAR | 83,00 | 100,00 | 120,48 |
| 5 | BABAKAN CIPARAY | 83,33 | 83,33 | 100,00 |
| 6 | BATUNUNGGAL | 75,00 | 78,31 | 104,41 |
| 7 | BANDUNG KIDUL | 75,00 | 80,00 | 106,67 |
| 8 | BANDUNG KULON | 75,00 | 100,00 | 133,33 |
| 9 | BANDUNG WETAN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | BUAH BATU | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 11 | BOJONGLOA KALER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | BOJONGLOA KIDUL | 83,33 | 83,33 | 100,00 |
| 13 | CIBEUNYING KALER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | CIBEUNYING KIDUL | 66,67 | 66,67 | 100,00 |

| NO | KECAMATAN | TARGET DAN REALISASI | | |
|-----------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL | | |
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 15 | CIBIRU | 75,00 | 100,00 | 133,33 |
| 16 | CICENDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | CIDADAP | 66,66 | 66,66 | 100,00 |
| 18 | CINAMBO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | COBLONG | 70,97 | 70,97 | 100,00 |
| 20 | GEDE BAGE | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | KIARACONDONG | 83,33 | 83,33 | 100,00 |
| 22 | LENGKONG | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 23 | RANCASARI | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | REGOL | 57,14 | 57,14 | 100,00 |
| 25 | MANDALAJATI | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 26 | SUKASARI | 75,00 | 100,00 | 133,33 |
| 27 | SUKAJADI | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| 28 | SUMUR BANDUNG | 75,00 | 100,00 | 133,33 |
| 29 | UJUNG BERUNG | 80,00 | 100,00 | 125,00 |
| 30 | PANYILEUKAN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 4 Kecamatan Kiaracondong yaitu Persentase Kelurahan Unggul pada tahun 2022 sebesar 83,33 % dari target 83,33 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00% tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Kecamatan Arcamanik, Buahbatu, Cibeunying Kidul, Cidadap, Coblong, Regol, Mandalajati dan Sukajadi dengan capaian kerjanya sebesar 100,00%, maka Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 4 yaitu terdiri atas program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk tahun 2022 mencapai 100,00 %.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 88,33 %. Realisasi (*inputs*) 83,33 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{83,33\%}{83,33\%} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program penyelenggaraan



pemerintahan dan pelayanan publik dalam RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

| NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | OUTPUTS | INPUTS | CAPAIAN (%) |
|---|--|-------------|-------------|---|
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Kelurahan Unggul | 6 Kelurahan | 5 Kelurahan | $= \frac{\text{Memenuhi kriteria}}{\text{Target Kel Unggul}} \times 100\%$ $= \frac{5 \text{ Kel}}{6 \text{ Kel}} \times 100\% = 83,33\%$ |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase laporan RT/RW tepat waktu | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$ |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan RT RW tepat waktu | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100\% = 100,00\%$ |
| Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase pelayanan kependudukan tepat waktu sesuai SOP | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$ |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah pelayanan kependudukan tepat waktu sesuai SOP | 7 jenis | 7 jenis | $\frac{7 \text{ jenis}}{7 \text{ jenis}} \times 100\% = 100,00\%$ |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik | 100,00 % | 100,00 % | $\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | - Jumlah taman terpelihara - Panjang ruas jalan saluran air terpelihara | - 6 taman - 82.252 m | - 6 taman - 82.252 m | $= \frac{6 \text{ tmn}}{6 \text{ tmn}} \times 100\% = 100,00 \%$ $= \frac{82.252 \text{ m}}{82.252 \text{ m}} \times 100\% = 100,00 \%$ |
| Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang di kesejahteraan sosial | 4 lap | 4 lap | $\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 12 lap | 12 lap | $\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$ |

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 5.555.617.680,- atau 98,10 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.663.384.860,-.

Faktor pendukung Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kecamatan dan Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.

Solusi Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong :

Untuk meningkatkan sasaran 4 dengan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga yang terkait untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul agar 10 jenis kondisi kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPJMD dan janji Kepala Daerah.



2. Meningkatkan sumber daya yang ada, untuk lebih terfokus kepada 10 jenis kondisi kegiatan yang menjadi Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

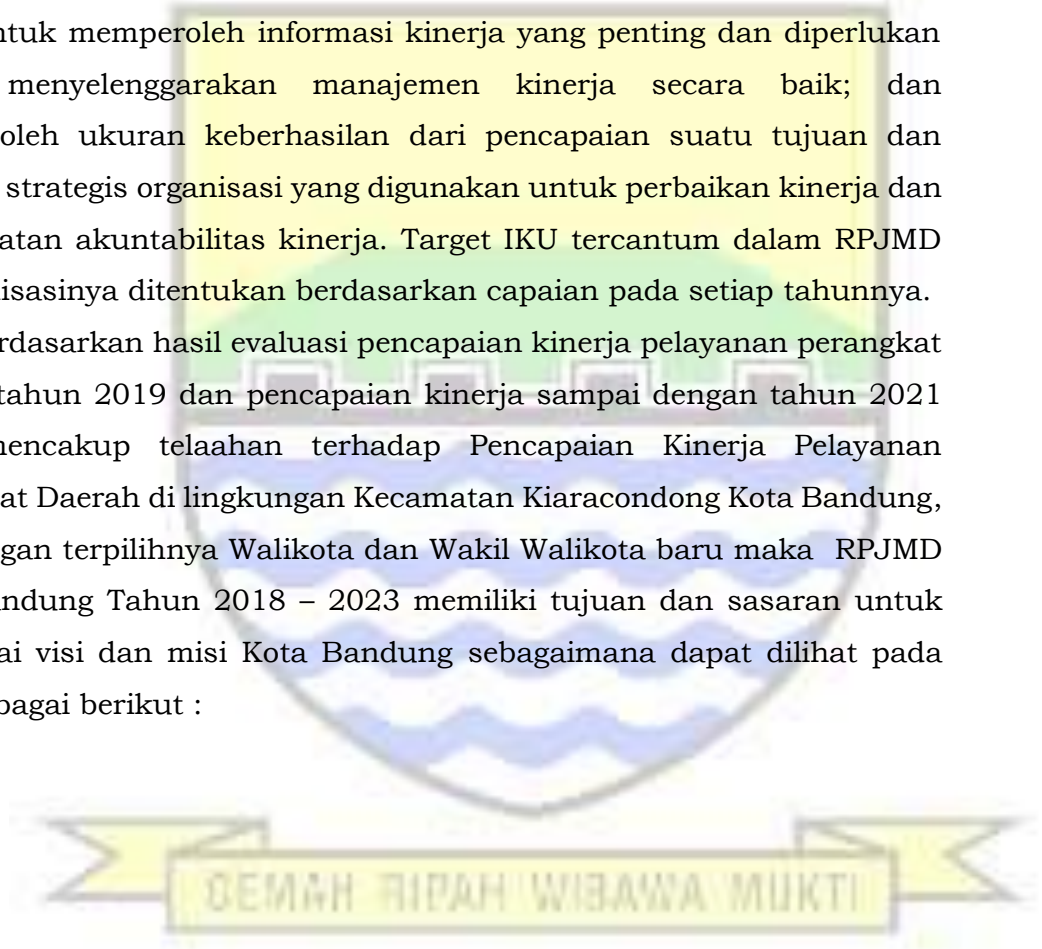




Penetapan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan atau sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Target IKU tercantum dalam RPJMD dan realisasinya ditentukan berdasarkan capaian pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2019 dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2021 yang mencakup telaahan terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dan dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota baru maka RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi Kota Bandung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | | Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2023 | Catatan Analisis |
|----|---|--|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Persentase Siskamling RW Aktif | - Output (Keluaran) - Outcome (Hasil) | 98,82% | n/a | n/a | 95,29 | 96,47 | 98,82 | n/a | n/a | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | - Output (Keluaran) - Outcome (Hasil) | 76% | n/a | n/a | 74 | 75 | 76 | n/a | n/a | 101,01% | 100,71% | 100% | |
| 3 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | - Output (Keluaran) - Outcome (Hasil) | 85,25 Nilai | 80,00 | 82,00 | 83,00 | 84,25 | 85,25 | 101,43 % | 101,50 % | 100,48% | 101,10% | 100% | |
| 4 | Persentase Kelurahan Unggul | - Output (Keluaran) - Outcome (Hasil) | 100% | 33,33 | 50,00 | 66,67 | 83,33 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KIARACONDONG

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara Kecamatan Kiaracondong dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Kiaracondong berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi urusan pelayanan Kecamatan Kiaracondong, yaitu permasalahan tingkat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong setelah perubahan.

| No | Tupoksi | Isu Strategis (stlh perubahan) |
|----|-----------|--|
| 1 | Kecamatan | Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. |
| 2 | Kecamatan | Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur |

| | | |
|---|-----------|---|
| | | <p>Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kiaracondong dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p> |
| 3 | Kecamatan | <p>Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan</p> |

| | | |
|---|-----------|---|
| | | <p>prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p> |
| 4 | Kecamatan | <p>Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p> |

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Kiaracondong setelah perubahan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam pembangunan
3. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Kebijakan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan

RKPD Kecamatan Kiaracondong tahun 2023, berfokus pada kinerja RPJMD Perubahan 2018 – 2023 Kota Bandung dan Renstra Perubahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 – 2023 yang belum tercapai serta permasalahan yang akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2023. Berdasarkan asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, dan berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta hasil pemetaan (mapping) RPJMD Perubahan 2018 - 2023 maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan diharapkan mampu memberi daya ungkit terhadap pembangunan di kewilayahan. Berdasarkan analisis kebutuhan, dapat dilihat dari hasil reviu terhadap RKPD seperti dalam tabel berikut dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.24

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nonor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--|---|------------------|-----------------------|---|--|---|------------------|-----------------------|--|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Siskamling RW Aktif | 98,82 % | 1.839.062.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Siskamling RW Aktif | 98,82 % | 1.781.585.660 | |
| 1 | Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah siskamling RW yang terbina | 84 siskamling RW | 1.839.062.000 | Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah siskamling RW yang terbina | 84 siskamling RW | 1.781.585.660 | |
| 1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah pembinaan siskamling RW | 4 kegiatan | 1.839.062.000 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah pembinaan siskamling RW | 4 kegiatan | 1.781.585.660 | Program Prioritas hasil analisis kebutuhan |
| II | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan | 76,00 % | 12.678.756.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | 76,00 % | 11.849.998.167 | |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|---|---|---------------------|----------------|---|---|---|---------------------|----------------|--|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dan RW terbina | 14 lembaga 64 RW | 12.425.000.000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dan RW terbina | 14 lembaga 64 RW | 11.495.811.467 | |
| 1.1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi | 340 kegiatan | 10.625.000.000 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi | 465 kegiatan | 9.682.712.488 | Janji Politik Wali Kota |
| 1.2 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi | 72 kegiatan | 1.800.000.000 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi | 160 kegiatan | 1.813.098.979 | Janji Politik Wali Kota |
| 2 | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina | 106 unit | 253.756.000 | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina | 106 unit | 354.186.700 | |
| 2.1 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah posyandu purnama | 100 unit | 225.821.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah posyandu purnama terbina | 100 unit | 310.118.000 | Program Prioritas hasil analisis kebutuhan |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Rancangan Awal RKP | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting |
|------------|---|--|---|----------------|-----------------------|---|--|---|----------------|-----------------------|--|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2 | Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah UKM yang terbina | 6 unit | 27.935.000 | Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah UKM yang terbina | 6 unit | 44.068.700 | Program Prioritas hasil analisis kebutuhan |
| III | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi) | 90 % | 16.048.626.000 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 90 % | 27.707.700.467 | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90% | 80.504.000 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90% | 168.058.440 | |
| 1.1 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 laporan | 80.504.000 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 laporan | 168.058.440 | |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 90% | 12.704.047.000 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 90% | 12.395.320.069 | |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 12 laporan | 12.704.047.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 12 laporan | 12.395.320.069 | |
| 3 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 laporan | 60.954.000 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 laporan | 60.217.500 | |
| 3.1 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 1 laporan | 60.954.000 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 1 laporan | 60.217.500 | |
| 4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90% | 676.077.000 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90% | 946.307.601 | |
| 4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4 laporan | 10.766.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4 laporan | 21.015.518 | |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 laporan | 178.733.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 laporan | 235.899.600 | |
| 4.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4 laporan | 63.365.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4 laporan | 52.221.000 | |
| 4.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4 laporan | 230.818.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4 laporan | 360.129.700 | |
| 4.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | 4 laporan | 77.027.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | 4 laporan | 103.747.783 | |
| 4.6 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 4 laporan | 26.532.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 4 laporan | 28.416.000 | |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.7 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur | 90% | 88.836.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur | 90% | 144.878.000 | |
| 5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 354.075.000 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 11.589.614.322 | |
| 5.1 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terealisasi | 1 unit | 35.365.000 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terealisasi | 8 unit | 310.980.916 | |
| 5.2 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit mebelair terealisasi | 85 unit | 88.852.000 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit mebelair terealisasi | 219 unit | 302.018.942 | |
| 5.3 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terealisasi | 30 unit | 229.858.000 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terealisasi | 158 unit | 972.628.464 | |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|---|--|-----------------|----------------|---|---|--|-----------------|----------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.4 | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya terealisasi | 0 unit | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya terealisasi | 1 unit | 10.003.986.000 | |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 1.143.444.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 1.328.771.700 | |
| 6.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah jasa bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 jasa bulanan | 217.904.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah jasa bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 jasa bulanan | 211.291.700 | |
| 6.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 laporan | 925.540.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 laporan | 1.117.480.000 | |
| 7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 1.029.526.000 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 1.219.410.835 | |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--|---|-----------------|----------------------|---|--|---|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara | 36 unit | 728.101.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara | 36 unit | 790.846.300 | |
| 7.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terealisasi | 60 unit | 48.609.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terealisasi | 67 unit | 55.319.000 | |
| 7.3 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 6 unit | 252.816.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara | 5 unit | 373.245.535 | |
| IV | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Kelurahan Unggul | 100,00 % | 6.533.029.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Kelurahan Unggul | 100,00 % | 5.754.074.958 | |
| 1 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Laporan RT RW tepat waktu | 100% | 2.909.476.000 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Laporan RT RW tepat waktu | 100% | 2.719.520.000 | |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|---|--|-------------------------|----------------|--|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah Laporan RT RW tepat waktu | 4 laporan | 2.909.476.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah Laporan RT RW tepat waktu | 4 laporan | 2.719.520.000 | Janji Politik Wali Kota |
| 2 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP | 100% | 121.415.000 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP | 100% | 165.655.600 | |
| 2.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP | 7 jenis | 121.415.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP | 7 jenis | 165.655.600 | Program/ lanjutan |
| 3 | Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik | 100% | 2.364.275.000 | Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik | 100% | 2.058.946.598 | |
| 3.1 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah Taman terpelihara / Panjang jalan dan saluran air terpelihara | - 6 taman - 83.252 m | 2.364.275.000 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah Taman terpelihara / Panjang jalan dan saluran air terpelihara | - 8 taman - 83.252 m | 2.058.946.598 | Program/ lanjutan |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial | - 4 laporan | 1.137.863.000 | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial | - 4 laporan | 809.952.760 | |
| 4.1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - 12 laporan | 1.137.863.000 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - 12 laporan | 809.952.760 | Program/ lanjutan |



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN MASYARAKAT

Kebijakan belanja daerah Kota Bandung merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung khususnya di kewilayahan. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi maka arah kebijakan belanja berdasarkan pada prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2023.

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan yang berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas pengguna anggaran ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan. Kebijakan belanja tahun 2023 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja terbagi atas kebijakan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kebijakan belanja langsung meliputi sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat.
2. Penganggaran belanja langsung untuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.



4. Belanja untuk mengakomodir usulan musrenbang dan reses yang disampaikan melalui *musrenbang* tingkat Kecamatan.
5. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan fokus pada belanja modal berupa bangunan, jalan, jembatan, dan aset untuk menjamin APBD diarahkan untuk menambahkan nilai aset milik pemerintah kota.
6. Mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya.
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi tiru dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
9. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program/kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan.
10. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan output yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien.

Kebijakan belanja tidak langsung meliputi sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-





undangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik.

3. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.25

Usulan Program Prioritas Musrenbang Tahun 2022 untuk RKPD Tahun 2023
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|---|---|---------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kelurahan Sukapura Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan di RW 01, RW 05, RW 06, RW 09, RW 10 dan RW 13 | Dis Hub | 14 unit | Sebagai alat bantu pengamanan bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2 dan 4 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kelurahan Babakansari Jl. Babakan Sari III wilayah RW 09 dan 05 serta Jl. Garu I RW 11 | Dis Hub | 40 titik | Pengamanan jalan lintasan bagi kendaraan bermotor |
| 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kelurahan Kebon Kangkung di wilayah RW 01 s.d. RW 11 | Dis Hub | 30 titik | Pengamanan jalan lintasan bagi kendaraan bermotor |
| 4 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran/ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Kelurahan Sukapura di wilayah RW 01, RW 03, RW 04, RW 05, RW 08, RW 10 dan RW 11 | DKPB | 19 unit | Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran Lingkungan (Sprinkler Warga) |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|--|---|------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 5 | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh/Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jl. Babakan Sari I wilayah RW 14, Kota Bandung | DPKP | 5 unit | Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Kumuh/Bantuan Stimulan Perbaikan Rutilahu 42 |
| 6 | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh/Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Kelurahan Kebon Kangkung wilayah RW 01 s.d. RW 11 Kota Bandung | DPKP | 24 unit | Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Kumuh//Bantuan Stimulan Perbaikan Rutilahu 43 |
| 7 | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh/Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan | Jl Sukapura RW 02, RW 03, RW 06, RW 07, RW 09, RW 10 dan RW 15 Kota Bandung | DPKP | 22 unit | Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Kumuh//Bantuan Stimulan Perbaikan Rutilahu 44 |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|--|--|------|----------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | |
| 8 | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh/Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jl. Soma RT 02 RW 11, Kelurahan Babakan Surabaya Kota Bandung | DPKP | 1 titik | Penyediaan Sarana Air Bersih/Penyediaan Sarana Air Bersih Kota Bandung 11 |
| 9 | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh/Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Gang Slamet 2 RT 01-09 RW 02 dan RW 03, Gg Mesjid I RT 01,02,03,04,05,06,09 RW 04, Kelurahan Babakan Surabaya Kota Bandung | DPKP | 1.270 M2 | Pekerjaan Jalan lentur/ Hotmix/ flexible pavement/Pekerjaan Jalan Lingkungan Kota Bandung 44 |
| 10 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan | Jl. Kampus I No. 36 Rt 01 RW 08 Kelurahan Babakansari Kota Bandung | DP3A | 1 Kelurahan | Penyediaan sarana Prasarana Puspel PP |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|---|---|--------|--------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| 11 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jl. Kampus I No. 36 RT 01 RW 08 Kelurahan Babakansari Kota Bandung | DP3A | 100 Orang | Capacity Building bagi Pengurus dan anggota PUSPEL PP Kelurahan |
| 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan | Jl. Arum Sari VII wilayah RW 12 Kelurahan Babakansari Kota Bandung | DSDABM | 600 m ² | Perbaikan jalan yang sudah rusak parah |
| 13 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE/Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub | Jl. Babakan Sari I RT 01,02,03,04,05 RW 14 Kelurahan Babakansari Kota Bandung | DSDABM | 500 m' | Pembangunan Saluran Jalan |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|--|---|--------|-----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | | | | |
| 14 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Jalan | Jl. PSM RW.10, RW.11 & RW.13 Kelurahan Kebon Jayanti Kota Bandung | DSDABM | 1009,8 m ² | Pembangunan Trotoar Beton Pola |
| 15 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)/Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai | Babakan Tangsi RT. 006 RW. 006 Kelurahan Cicaheum Kota Bandung | DSDABM | 10 m ¹ | Pemasangan Pagar Pengaman Sungai/Saluran |
| 16 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Jalan | Jl. Sulaksana RW. 012 Kelurahan Cicaheum Kota Bandung | DSDABM | 115 m ² | Pembangunan Trotoar (Paving Block) |
| 17 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE/Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jl. Sulaksana dan Jl. Ters. Jakarta RW. 012 Kelurahan Cicaheum Kota Bandung | DSDABM | 115 m | Pembangunan Saluran Jalan |
| 18 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)/Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan | Jln Sukapura RW 02, RW 06, RW 07, RW 14 dan RW 15 Kelurahan Sukapura Kota Bandung | DSDABM | 22 unit | Sumur Resapan dangkal |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|--|--|--------|----------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | | | | |
| 19 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)/Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai | Jl Sukamanah RT 03 dan RT 04 RW 13, Kota Bandung, Kiaracondong, Sukapura | DSDABM | 112 m3 | Normalisasi atau pengerukan sungai / saluran |
| 20 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE/Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jl Papanggungan RT 01 dan RT 06 RW 11, Kota Bandung, Kiaracondong, Sukapura | DSDABM | 28 m1 | Pemasangan TPT sungai / saluran setinggi 3 m |
| 21 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan | JL Babakan Hantap I RT 01,02,03,04 RW 08 dan RW 09 Kelurahan Babakan Surabaya Kota Bandung | DSDABM | 896 m2 | Pengaspalan Jalan |
| 22 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)/Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai | sepanjang kali Ciateul dan Cibeunying Kelurahan Kebon Kangkung RW 01 s/d 11 Kota Bandung | DSDABM | 2000 m3 | Normalisasi atau pengerukan sungai / saluran |



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 berdasarkan acuan kinerja yang terdapat dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Revisi Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjangkau usulan prioritas pembangunan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap NAWACITA, SDG's, Standar Pelayanan Minimal, program terkait pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta permasalahan pembangunan yang mendesak.
- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023.
- c. Korelasinya terhadap pengembangan sector/bidang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

3.1.1 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

**“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil,
dan Berkesinambungan”**

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055

2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020 - 2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi
 - a. Pangan dan pertanian
 - b. Energi, mineral, dan pertambangan
 - c. Kelautan dan kemaritiman
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif dan digital
 - f. Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:

- Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
- Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
- Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
- Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik

3.1.2 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”



Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesenjangan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategis dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layat rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub

- d. Gudang tani dan ikan Juara
- e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembangan SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren
 - d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)
6. Infrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
 - a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
 - a. Provinsi pintar (E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi

permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat.

3.1.3 Penelaahan Rancangan KLHS

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG'S) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi



pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDG's).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum



dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneagra
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan



13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di Kota/Kabupaten. Hasil konsultasi publik memuat 14 isu/permasalahan pembangunan di Kota Bandung berdasarkan hasil penapisan, yaitu meliputi:

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal;
2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi;
3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan;
4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air;
5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis;
6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung;



7. Tingginya tingkat kemacetan;
8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas;
9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung;
10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya local;
11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan;
12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar;
13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan;
14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik.

3.1.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung

Berdasarkan hasil telaah terhadap Isu Global, isu nasional, Isu Regional, SDGs, Capaian kinerja RPJMD tahun lalu dan prediksi permasalahan yang akan datang, diidentifikasi terdapat 8 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu dalam skema keterkaitan, dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 3.1
Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung





3.1.5 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu

memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Bertolak dari penelaahan terhadap isu tata ruang wilayah Kota Bandung serta permasalahan pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Isu-isu Strategis setelah Perubahan

| Isu Strategis Nasional | Isu Strategis Provinsi | Isu Strategis KLHS | Isu Strategis Kota Bandung | Isu Strategis Kecamatan Kiaracondong |
|---|---|--|--|---|
| 1. Pembangunan Manusia : - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 5. Pembangunan Polhukkamhan : - Hukum dan Regulasi | 1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi Birokrasi | 1. Pengelolaan sampah yang belum optimal 2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi 3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan 4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air 5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis 6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung 7. Tingginya tingkat kemacetan 8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas 9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung 10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal 11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan | 1. Pembangunan Modal Sosial 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 4. Tata Kelola Pemerintahan 5. Optimalisasi Infrastruktur dan pemanfaatan ruang 6. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi pengelolaan persampahan 7. Peningkatan Perekonomian Kota dengan fokus pada Sektor Pariwisata 8. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS serta Ketimpangan Pendapatan 9. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan | 1. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang 2. Tata kelola pemerintahan (peningkatan kualitas pelayanan publik) |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Hankam- Politik | | <ol style="list-style-type: none">12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik | | |
|--|--|---|--|--|



Berdasarkan fokus pembangunan tahunan, maka tema pembangunan tahunan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung selama kurun waktu 5 tahun (periode Renstra) tercantum dalam program kerja Kecamatan Kiaracondong yang dicanangkan untuk mencapai visi dan misi pemerintah Kota Bandung serta tujuan dan sasaran perangkat daerah khususnya Kecamatan Kiaracondong. Adapun program kerja yang akan di launchingkan dan dilaksanakan Kecamatan Kiaracondong untuk mencapai tujuan dan sasarnya adalah sebagai berikut :

“Launching Program Kerja Kecamatan Kiaracondong”

| No | Tahun | Program Kerja Kecamatan |
|----|-------|-------------------------------|
| 1 | 2019 | Kiaracondong Ngahiji |
| 2 | 2020 | Kiaracondong Geulis |
| 3 | 2021 | Kiaracondong Wisata |
| 4 | 2022 | Kiaracondong Sejahtera |
| 5 | 2023 | Kiaracondong Juara dan Agamis |

1. Kiaracondong Ngahiji

Mewujudkan kehidupan masyarakat Kecamatan Kiaracondong yang bersatu (**Ngahiji**) dari berbagai unsur dan elemen masyarakat serta stake holder yang ada di wilayah Kecamatan Kiaracondong. Program Kerja tahun pertama untuk mencapai motto Kiaracondong Hade yang Unggul dan Agamis adalah menyatukan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kiaracondong untuk mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis melalui peningkatan pelayanan dasar, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, peningkatan perekonomian kewilayahan, penguatan kelembagaan kewilayahan dan

pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih.

2. **Kiaracondong Geulis**

Mewujudkan seluruh wilayah Kecamatan Kiaracondong bersih, rapih, teratur dan tertata dengan baik yang merupakan bentuk atau bagian dari keindahan kota dalam rangka menciptakan wilayah Kecamatan Kiaracondong yang cantik (**Geulis**). Setelah program kerja menyatukan seluruh elemen masyarakat maka tahun berikutnya adalah bersama-sama seluruh elemen yang ada di Kecamatan Kiaracondong dengan mempercantik kewilayahan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis melalui peningkatan pelayanan dasar, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, peningkatan perekonomian kewilayahan, penguatan kelembagaan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih.

3. **Kiaracondong Wisata**

Menciptakan wilayah Kecamatan Kiaracondong dengan nuansa dan konsep wisata adalah merupakan sebuah bentuk penyesuaian antara akomodasi, atraksi dan fasilitas yang mendukung untuk disajikan pada struktur yang menyatu dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Kiaracondong. Konsep wisata menciptakan Kecamatan **Kiaracondong Wisata** yang menarik untuk dikunjungi. Untuk membangun Kiaracondong wisata dibutuhkan perencanaan yang matang dan dipersiapkan dengan baik dan semuanya kembali pada orang-orang yang mengelola hal tersebut. Segala aspek dan sumber daya yang ada dikewilayahan Kecamatan Kiaracondong dapat dijadikan area wisata seperti wisata kantor, wisata jalan, wisata lingkungan dan lain sebagainya yang jadikan sebagai obyek pariwisata. Konsep wisata ini dapat terwujud dengan melakukan beberapa hal yang dapat mendukung diantaranya situasi sosial, inovasi dan keamanan lingkungan.

4. **Kiaracondong Sejahtera**

Mewujudkan keadaan wilayah Kecamatan Kiaracondong yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Untuk menciptakan konsep Kecamatan **Kiaracondong Sejahtera** dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya Rasa aman, Kesejahteraan, Kebebasan dan Jati diri. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan tercapainya program kerja Kecamatan Kiaracondong *ngahiji*, Kiaracondong *geulis*, dan Kiaracondong *wisata* diharapkan dapat terwujudnya masyarakat Kiaracondong yang *sejahtera* baik secara lahir maupun batin.

5. **Kiaracondong Juara dan Agamis**

Merupakan suatu yang tidak dapat dipisah, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat Kecamatan **Kiaracondong Juara dan Agamis** adalah kondisi yang harus hadir sepanjang hidup seluruh masyarakat yang ada dikewilayahan Kecamatan Kiaracondong khususnya dan kota Bandung pada umumnya. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2021 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID -19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2022 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program/kegiatan pada Rencana Strategis Kecamatan, dapat dilihat dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 3.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Kecamatan Kiaracondong Setelah Perubahan Tahun 2018 – 2023**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Kondisi Awal periode Renstra | Realisasi | | Target Kinerja setelah Perubahan | | | Kondisi Akhir periode Renstra |
|---|--|--|--|--------|------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | |
| 1 | Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat | | Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan | % | 80,00 | 30,45 | 42,56 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 76,00 |
| | | <i>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong</i> | Persentase Siskamling RW Aktif | % | N/A | N/A | N/A | 95,29 | 96,47 | 98,82 | 98,82 |
| | | <i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong</i> | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | % | 80,00 | 30,45 | 42,56 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 76,00 |
| Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih | | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | Nilai | 80,00 | 81,14 | 83,23 | 83,00 | 84,25 | 85,25 | 85,25 |
| | | <i>Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong</i> | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong | Nilai | 80,00 | 81,14 | 83,23 | 83,00 | 84,25 | 85,25 | 85,25 |
| | | <i>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong</i> | Persentase Kelurahan Unggul | % | N/A | 33,33 | 50,00 | 66,67 | 83,33 | 100,00 | 100,00 |



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Program dan kegiatan yang telah dirumuskan untuk tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.1 di bawah ini Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

| No | Urusan | Bidang | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan |
|-----|-------------------|-----------|---|---|
| I | Unsur Kewilayahan | Kecamatan | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
| | | | | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| II | Unsur Kewilayahan | Kecamatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
| | | | | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| | | | | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| | | | | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |
| | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
| III | Unsur Kewilayahan | Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |



| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| | | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan |
| | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel |





| | | | | |
|----|-------------------|-----------|---|--|
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| IV | Unsur Kewilayahan | Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| | | | | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | | Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
| | | | | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
| | | | | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| | | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Proses penyusunan program dan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top-down, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademis yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan tahun 2023.
2. Pendekatan partisipatif dan bottom-up dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui *e-musrenbang*, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;
 - c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Bandung;

- e. Pelibatan secara aktif warga dalam forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang pada forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD tahun 2023 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global, seperti SDG's (*Sustainable Development Goals*) dan pemenuhan SPM (*Standar Pelayanan Minimal*).
4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui :
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah.
 - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

Ringkasan anggaran perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2023.

Secara rinci rumusan rincian proyeksi belanja perangkat daerah dan program prioritas perangkat daerah dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong beserta ringkasan anggarannya dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :



Rincian Proyeksi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

| No | SKPD | Rincian | Rincian Belanja 2023 |
|----|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Kecamatan Kiaracondong | Belanja Operasi | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.395.320.069,00 |
| | | Belanja Kegiatan | 34.698.039.183,00 |
| | | Total | 47.093.359.252,00 |

Ringkasan Anggaran Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023

| No | Perangkat Daerah | Pagu Indikatif Tahun 2023 | | | | Jumlah |
|----|------------------------|--|----------------|------------------------------|------------------|----------------|
| | | Program Prioritas | | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | Urusan Penunjang | |
| | | Program | Anggaran | | | |
| 1 | Kecamatan Kiaracondong | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 11.849.998.167 | 7.535.660.618 | 27.707.700.467 | 47.093.359.252 |

Penjelasan lebih rinci terkait dengan rumusan rencana Program dan Perangkat Daerah dalam hal ini Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong pada Tahun 2023 disertai dengan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

Total Pagu : 47.093.359.252

| Kode | | | | | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | Sumber Dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - Persentase Siskamling RW Aktif | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | 98,82 % | 1.781.585.660 | Pendapatan Asli Daerah | Program Prioritas | 76,47 % | 1.808.309.445 |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - Jumlah Siskamling RW yang terbina | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 84 siskamling RW | 1.781.585.660 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 65 satkamling RW | 1.808.309.445 |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau | - Jumlah pembinaan siskamling RW | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 4 kegiatan | 1.781.585.660 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 4 kegiatan | 1.808.309.445 |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | Sumber Dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 76,00 % | 11.849.998.167 | Pendapatan Asli Daerah | Janji Politik Wali Kota | - 100 % | 8.084.499.501 |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dan RW terbina | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 14 lembaga - 64 RW | 11.495.811.467 | Pendapatan Asli Daerah | Janji Politik Wali Kota | - 6 Kelurahan | 7.725.000.000 |
| 7 01 03 2.02 02 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | - Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 465 kegiatan | 9.682.712.488 | Pendapatan Asli Daerah | Janji Politik Wali Kota | - 90 kegiatan | 6.375.000.000 |
| 7 01 03 2.02 03 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | - Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 160 kegiatan | 1.813.098.979 | Pendapatan Asli Daerah | Janji Politik Wali Kota | - 54 kegiatan | 1.350.000.000 |
| 7 01 03 2.03 | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 106 unit | 354.186.700 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 18 LKK | 359.499.501 |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | Sumber Dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 01 03 2.03 01 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | - Jumlah posyandu purnama terbina | Kecamatan Kiaracondong | - 100 unit | 310.118.000 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 62 kegiatan | 314.769.770 |
| 7 01 03 2.03 04 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | - Jumlah UKM yang terbina | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 6 unit | 44.068.700 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 6 kegiatan | 44.729.731 |
| 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi) | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 90 % | 27.707.700.146 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 90 % | 18.324.254.349 |
| 7 01 01 2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Kiaracondong | - 90 % | 168.058.440 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 90 % | 171.419.609 |
| 7 01 01 2.01 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Kiaracondong | - 1 laporan | 168.058.440 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 1 laporan | 171.419.609 |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|---|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | Sumber Dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 01 01 2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Kiaracondong | - 90 % | 12.395.320.069 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKP | - 90 % | 13.015.086.072 |
| 7 01 01 2.02 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Kecamatan Kiaracondong | - 12 laporan | 12.395.320.069 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKP | - 12 laporan | 13.015.086.072 |
| 7 01 01 2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kecamatan Kiaracondong | - 1 laporan | 60.217.500 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKP | - 1 laporan | 63.228.375 |
| 7 01 01 2.05 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - Jumlah laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Kiaracondong | - 1 laporan | 60.217.500 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKP | - 1 laporan | 63.228.375 |
| 7 01 01 2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 90 % | 946.307.601 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKP | - 90 % | 965.233.753 |
| 7 01 01 2.06 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi | - Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik / | Kecamatan & Kelurahan Se- | - 4 laporan | 21.015.518 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur | - 4 laporan | 21.435.828 |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | Sumber Dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | | | |
| | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | penerangan bangunan kantor | Kecamatan Kiaracondong | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 4 laporan | 235.899.600 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 4 laporan | 240.617.592 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 4 laporan | 52.221.000 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 4 laporan | 53.265.420 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 4 laporan | 360.129.700 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 4 laporan | 367.332.294 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | - Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan pengandaan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 4 laporan | 103.747.783 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 4 laporan | 105.822.739 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | - Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 4 laporan | 28.416.000 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 4 laporan | 28.984.320 |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------------------|--|--|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | Sumber Dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 01 01 2.06 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai prosedur | Kecamatan Kiaracondong | - 90 % | 144.878.000 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 90 % | 147.775.560 |
| 7 01 01 2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 90 % | 11.589.614.322 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 90 % | 1.510.140.354 |
| 7 01 01 2.07 01 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Jumlah unit pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terrealisasi | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 0 unit | 0 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 7 unit | 210.000.000 |
| 7 01 01 2.07 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terrealisasi | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 8 unit | 310.980.916 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 0 unit | 0 |
| 7 01 01 2.07 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | - Jumlah unit mebelair terrealisasi | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 219 unit | 302.018.942 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 200 unit | 308.059.321 |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|---|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | Sumber Dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 01 01 2.07 06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terrealisasi | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 158 unit | 972.628.464 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 150 unit | 992.081.033 |
| 7 01 01 2.07 09 | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Jumlah unit pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya terrealisasi | Kecamatan Kiaracondong | - 1 unit | 10.003.986.000 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 0 unit | 0 |
| 7 01 01 2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 90 % | 1.328.771.700 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 90 % | 1.355.347.134 |
| 7 01 01 2.08 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Jumlah jasa bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 12 jasa bulanan | 211.291.700 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 12 jasa bulanan | 215.517.534 |
| 7 01 01 2.08 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 12 laporan | 1.117.480.000 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 12 laporan | 1.139.829.600 |
| 7 01 01 2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | - Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | Kecamatan & Kelurahan Se- | - 90 % | 1.219.410.835 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur | - 90 % | 1.243.799.052 |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------|----------------------|
| | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | Sumber Dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | | | |
| | Pemerintahan Daerah | Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Kiaracondong | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Jumlah unit Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 41 unit | 790.846.300 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 39 unit | 806.663.226 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terrealisasi | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 68 unit | 55.319.000 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 70 unit | 56.425.380 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 5 unit | 373.245.535 | Pendapatan Asli Daerah | Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD | - 6 unit | 380.710.446 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - Persentase Kelurahan Unggul | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 100 % | 5.754.074.958 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 100 % | 5.840.386.082 |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | Sumber Dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 01 02 2.01 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - Persentase Laporan RT RW tepat waktu | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 100 % | 2.719.520.000 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 100 % | 2.760.312.800 |
| 7 01 02 2.01 02 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - Jumlah Laporan RT RW tepat waktu | Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 4 laporan | 2.719.520.000 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 4 laporan | 2.760.312.800 |
| 7 01 02 2.02 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 100 % | 165.655.600 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 100 % | 168.140.434 |
| 7 01 02 2.02 03 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 7 jenis | 165.655.600 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 7 jenis | 168.140.434 |





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

| Kode | | | | | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (tahun rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif | Sumber Dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / pagu indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | - Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 100 % | 2.058.946.598 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 100 % | 2.089.830.797 |
| 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | - Jumlah Taman terpelihara - Panjang jalan dan saluran air terpelihara | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 8 taman - 83.252 meter | 2.058.946.598 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 8 taman - 83.252 meter | 2.089.830.797 |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 4 laporan | 809.952.760 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 4 laporan | 822.102.051 |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong | - 12 laporan | 809.952.760 | Pendapatan Asli Daerah | Prioritas hasil analisis kebutuhan | - 12 laporan | 822.102.051 |





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2023 yang tidak hanya memuat program dan kegiatan dalam pelayanan publik tetapi memuat rancangan kebijakan keuangan Perangkat Daerah, prioritas dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah, serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, yang diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.

Penyusunan Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2023 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi, dimulai dari pelaksanaan Musrenbang pada level Rukun Warga, Musrenbang tingkat kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota serta mengakomodir usulan melalui mekanisme reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2023 merupakan tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 yang harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja untuk Tahun 2023, dan penyusunan KUA/PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2023.





Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganaggaran sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Proses yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan RKPD Tahun 2023 digunakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. Proses asistensi *offline* maupun *online* terhadap kesesuaian Program/Kegiatan dan belanja Perangkat Daerah yang dilakukan secara intensif di Bappelitbang yang bertujuan agar program prioritas yang telah disusun beserta indikator kinerja dan target dapat tercapai secara optimal.
3. Upaya menjaga keselarasan antara RKPD dengan RPJMD pada Tahun kelima dilakukan dengan secara konsisten menjadikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman, dimana sasaran daerah dalam RPJMD diimplementasikan dalam program tahunan Perangkat Daerah.
4. Penyelenggaraan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati prioritas pembangunan Tahun 2023 didukung dengan pemanfaatan aplikasi e-Musrenbang yang memberikan kesempatan secara luas kepada Rukun Warga (RW) melalui proses rembug warga untuk menyampaikan usulan dan dapat secara online mengetahui status usulan yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan RKPD 2023 diperlukan kaidah yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kecamatan Kiaracondong secara terarah, efektif dan efisien. Kaidah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan RKPD adalah:

1. Seluruh perangkat daerah yang ada di Kecamatan Kiaracondong berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2023 secara sinergis dan terintegrasi.





2. Program/kegiatan beserta alokasi anggaran yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja tahun 2023 selaras dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan menjadi dasar bagi perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah yang pencapaiannya diukur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappelitbang.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2023 bila diperlukan.

Program-program dan indikasi yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah ini tidak hanya menjabarkan rencana yang diakomodasi secara swakelola baik yang di danai dari DPA Kecamatan maupun Dinas Instansi terkait tingkat Kota, juga menjabarkan Prioritas Program dan pada tahun 2023 yang tidak dapat di akomodasikan dengan DPA Kecamatan.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kami susun ini dapat terlaksana dan diwujudkan sesuai dengan harapan seluruh warga masyarakat dan dapat kiranya memberikan gambaran tentang yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 di wilayah Kecamatan Kiaracondong.

Bandung, 17 Februari 2023

**PEMERINTAH KOTA
KIARACONDONG**
Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19651205 499303 2 008

